

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian akan memperoleh hasil yang memuaskan apabila didukung oleh metode penelitian yang tepat. Adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan pendekatan ini di dasarkan pada keterkaitan masalah sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya. Di samping itu pendekatan kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi, sehingga memungkinkan peneliti senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode ini dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu kelompok, organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari lingkup wilayahnya Arikunto (1989:115) mengungkapkan bahwa:

penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun serta mengaplikasikannya serta menginterpretasikannya

Di dalam penelitian ini, peneliti akan memusatkan diri secara intensif pada proses sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan sebagai objek yang akan dipelajari dari suatu kasus yang mendalam. Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai gambaran sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan.

Sejalan dengan pernyataan Arikunto, Mulyana (2002:201) mengemukakan bahwa:

studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek dari seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti (diperoleh melalui metode wawancara, pengamatan, penelaahan dokumen, hasil survei dan data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara rinci). Selain itu juga, peneliti mempelajari semaksimal mungkin subjek penelitian dengan tujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Sesuai dengan hal tersebut, diharapkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bisa secara komprehensif mengungkapkan fakta-fakta terkait dengan proses sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan yang terletak di kampung Fauzan Kabupaten Garut. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan observasi secara langsung dan wawancara dengan bertatap muka, akan tetapi mempelajari juga latar belakang subjek penelitian, proses sosialisasi nilai-nilai politik di Pesantren Fauzan dalam kaitannya dengan pendidikan politik, dan pandangan masyarakat setempat terhadap fenomena yang terjadi di sekitar pesantren tersebut yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hal tersebut tidak lain dilakukan untuk

mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai proses internalisasi nilai-nilai politik di pesantren tersebut.

Di samping itu, peneliti juga lebih banyak menggunakan pendekatan antar personal, artinya selama proses penelitian, peneliti lebih banyak mengadakan kontak atau hubungan dengan orang-orang di lingkungan lokasi penelitian. Hal ini agar selama dilakukan penelitian kondisinya tidak terlalu kaku. Dengan demikian, diharapkan peneliti dapat lebih leluasa dan lebih mengalir dalam menggali informasi dan memperoleh data yang lebih terperinci tentang berbagai hal yang diperuntukan untuk kepentingan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti sebagai instrumen utama penelitian atau alat utama penelitian (*key instrumen*), hal ini didasarkan pada peneliti sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi melalui observasi dan wawancara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong (2000:132) bahwa :

...bagi peneliti kualitatif manusia adalah instrumen utama karena ia menjadi segala bagi keseluruhan proses penelitian. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir dan pada akhirnya ia menjadi pelapor penelitiannya.

Adapun alasan peneliti dijadikan instrumen penelitian utama dalam penelitian ini didasarkan pada:

1. peneliti memiliki kepekaan dan dapat berinteraksi terhadap lingkungan, sehingga peneliti mampu mengetahui mana yang penting dan mana yang tidak penting,
2. peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua situasi dan kondisi sehingga peneliti dapat mengumpulkan berbagai data,

3. peneliti mampu berinteraksi dalam memahami suatu hal dan menyesuaikan diri terhadap suatu hal, maka dengan cara tersebut peneliti dapat merasakan, memahami, dan menghayatinya,
4. peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Peneliti dapat menafsirkannya, membuat hipotesis secepatnya untuk menentukan arah pengamatan dalam menguji hipotesis yang muncul seketika,
5. hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dan digunakan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau penolakan,
6. peneliti mampu meluruskan atau memilah jika ada jawaban yang menyimpang, karena jika menggunakan test atau angket hal-hal seperti itu tidak diantisipasi, hanya respon kuantitatif yang diutamakan sebagai data untuk diolah secara statistik

Berdasarkan uraian diatas, penelitian kualitatif sangat mengutamakan manusia sebagai instrumen penelitian karena mempunyai adaptabilitas yang tinggi, jadi senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini sebagai berikut :

1. observasi

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Arikunto (1998:129) berpendapat bahwa “observasi dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan instrumen pengamatan maupun tanpa instrumen pengamatan”. Apabila diikhtisarkan alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan adalah bahwa pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan juga memungkinkan peneliti untuk melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan yang dianut oleh para subjek pada keadaan waktu itu. Dan yang terakhir, dalam hal ini pengamatan juga memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti sebagai sumber data. Intinya, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama baik dari pihak pengamat maupun dari pihak subjek. Berkaitan dengan hal tersebut, lebih lanjut Arikunto (2006:157) menyatakan bahwa:

observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu:

- a. observasi *non-sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
- b. observasi *sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

Adapun jenis observasi yang peneliti lakukan terhadap orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses sosialisasi nilai-nilai

politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan adalah jenis observasi sistematis dengan menggunakan instrumen sebagai pedoman pengamatan. Sebelum melakukan observasi peneliti melakukan pra penelitian terlebih dahulu untuk kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut. Secara spesifik observasi dilakukan terhadap kiai sebagai pimpinan pondok pesantren karena beliau lah yang memegang peran penting dalam pewarisan nilai-nilai politik dalam pesantren. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap beberapa santri, pengasuh pondok pesantren, dan beberapa orang sebagai perwakilan masyarakat di sekitar pesantren.

Observasi dilakukan menyangkut tentang apa dan bagaimana sampel penelitian yang telah dipilih dan disebutkan di atas memaknai, memahami, dan menerima setiap proses dari pewarisan nilai-nilai politik yang mereka dapatkan dari lingkungan pesantren. Oleh karena itu, dengan melakukan observasi secara langsung dan sistematis, tujuan dari metode studi kasus dalam penelitian ini diharapkan akan dapat mengungkap fakta-fakta secara lebih mendalam dan leluasa.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah “bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu” (Mulyana, 2002:180). Wawancara ini bertujuan untuk “mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, dan bagaimana padangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi (Nasution, 2003:73).

Dengan wawancara mendalam ini, diharapkan dapat diperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu dari semua responden dengan susunan kata dan urutan yang disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mulyana (2002:181) bahwa:

wawancara mendalam bersifat luwes susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya) responden yang dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut, maka metode ini memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan.

Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh lewat observasi. Melalui wawancara ini peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Al-wasilah (2002:154) bahwa:

...melalui wawancara, peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam (*in depth information*) karena beberapa hal, antara lain:

1. peneliti dapat menjelaskan atau memparafrase pertanyaan yang tidak dimengerti,
2. peneliti dapat mengajukan pertanyaan susulan (*follow up questions*),
3. responden cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan,
4. responden dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang.

Berkaitan dengan cara yang bisa dilakukan oleh pewawancara, menurut Arikunto (2006:156) mengatakan bahwa:

ditinjau dari pelaksanaannya, wawancara dibedakan atas:

- a. *interview bebas, inguided interview*, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan;
- b. *interview terpimpin, guided interview*, yaitu interviu yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dengan interview terstruktur;
- c. *interview bebas terpimpin*, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.

Adapun jenis wawancara yang penulis lakukan adalah penggabungan kedua jenis wawancara bebas dan terpimpin. Penggabungan kedua jenis tersebut mengingat data yang penulis perlukan tidak saja mengacu kepada hasil dari wawancara yang sudah tersistematis (pertanyaan), akan tetapi juga pada hal-hal yang dianggap perlu terkait sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan

Di dalam penelitian tentang sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan, wawancara mendalam dilakukan terhadap : 1) Kiai sebagai pimpinan pondok pesantren; 2) pengasuh pondok pesantren; 3) santri senior; 4) Alumni pesantren; 5) masyarakat sekitar; dan 6) tokoh pemuda di lingkungan sekitar pondok Pesantren Fauzan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ke enam sample penelitian tersebut dipilih karena mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam penggalian informasi terkait sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan

Di daalam melakukan wawancara ini, penulis melakukan beberapa pendekatan, yaitu:

1. wawancara yang bersifat mendalam dan luwes agar suasana wawancara tidak kaku yang akhirnya akan membuat penulis *nervous* ataupun membuat situasinya tidak nyaman bagi penulis ataupun informan;
2. wawancara mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, namun tetap santun. Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok, topik atau masalah yang dijadikan pembicaraan;
3. menggunakan lelucon ketika informan sudah terlihat bosan ataupun lelah untuk mengembalikan konsentrasinya pada pertanyaan-pertanyaan dari penulis;
4. menggunakan daftar pertanyaan yang lebih terinci namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan rumusan yang tercantum;
5. menggunakan susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya). Sesuai dengan informan yang diwawancarai. Sehingga, memungkinkan pihak yang diwawancarai diberi kebebasan untuk menggunakan istilah-istilah (kosa kata) yang lazim digunakan oleh pihak yang diwawancarai, sehingga proses wawancara tidak kaku.

Beberapa tahapan yang dilakukan penulis ketika melakukan wawancara diantaranya:

- 1) meminta izin terlebih dahulu kepada K.H Umar A'lam selaku pimpinan pondok pesantren untuk melakukan wawancara,
- 2) menunggu konfirmasi dari beliau (Bapak K.H Umar A'lam) siapa saja orang-orang yang bisa penulis temui untuk mengadakan wawancara,
- 3) setelah peneliti menerima konfirmasi dan mendapat izin lalu penulis segera menuju ke Pesantren Fauzan untuk mengadakan penelitian dan wawancara,
- 4) di ruang yang biasa dijadikan tempat pertemuan peneliti bertemu dengan para informan yang telah siap untuk diwawancara. Dengan membuat suasana sesantai mungkin agar proses wawancara tidak terkesan kaku lalu peneliti memperkenalkan diri dan dilanjutkan dengan mengemukakan maksud serta tujuan, memberikan informasi judul skripsi dan seputar permasalahan yang akan menjadi pembahasan,
- 5) menanyakan biodata singkat kepada responden diantaranya nama, usia, status pendidikan, lama tinggal di pesantren dan pengalaman berorganisasi,
- 6) ketika wawancara dimulai, responden diarahkan agar jawaban yang dilontarkan sesuai dengan apa yang akan ditanyakan dalam pedoman wawancara,

- 7) setelah semua data yang diinginkan sudah didapatkan biasanya ada perbincangan bebas sebagai bahan untuk menambah wawasan kepada peneliti, dan diakhiri dengan ucapan terimakasih,
- 8) jika ada kesempatan, peneliti lalu meminta untuk berfoto bersama sebagai bukti.

Pada penelitian ini, peneliti lebih mengutamakan pertanyaan terbuka dengan teknik wawancara. Dengan demikian, diharapkan akan memperoleh data dari responden yang lengkap. Wawancara yang peneliti lakukan juga bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana pandangan para responden tentang masalah yang sedang diteliti, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif yang sudah lama digunakan karena sangat bermanfaat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Moleong (2000:161) yaitu: "...dokumen sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan". Sedangkan Arikunto (1998:236) menjelaskan bahwa "metode dokumentasi merupakan salah satu cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya".

Pentingnya dokumen dalam penelitian kualitatif didasarkan pada beberapa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, seperti yang diungkapkan oleh Guba dan Lincoln (1981:235) yang mengatakan bahwa:

1. dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong;

2. berguna sebagai *bukti* untuk suatu pengujian;
3. keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks;
4. *record* relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan;
5. keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi;
6. hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Adapun metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:158) dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya;
- b. *check-list*, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini peneliti tinggal memberikan tanda atau *tully* setiap pemunculan gejala yang dimaksud.

4. Studi Literatur

Studi literatur merupakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian dan menunjang pada kenyataan yang berlaku pada penelitian.

C. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan kampung Fauzan, Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi kabupaten Garut. Kondisi pesantren yang menunjukan adanya pendidikan politik di dalamnya dan masih besarnya pengaruh kiai dalam preferensi politik para santri dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini memungkinkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif bertalian dengan tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Moleong (2000:165) bahwa "...pada penelitian kualitatif tidak ada sample acak tetapi sample bertujuan".

Berdasarkan uraian di atas, maka subjek yang akan diteliti ditentukan langsung oleh peneliti. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. K.H Aceng Umar A'lan selaku pimpinan Pondok Pesantren Fauzan
2. Aceng wahid sebagai pengasuh Pondok Pesantren Salaman yang merupakan cabang dari Pondok Pesantren Fauzan, disamping itu beliau juga sempat aktif dalam politik praktis sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut
3. Aceng Mujib sebagai bagian pengasuh pondok Pesantren Salaman (cabang Pesantren Fauzan) dan aktif juga pada tataran politik prtaktis

4. Saefulloh S.Pd sebagai tokoh pemuda di Desa Sukaresmi
5. Bapak Mimin sebagai perwakilan alumni pondok Pesantren Fauzan
6. Oob Abdurrohman perwakilan dari santri yang notabene sebagai *rois* (yang dituakan) di pondok Pesantren Fauzan

Sesuai dengan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan sample purposive, dimana besarnya sampel ditentukan oleh adanya pertimbangan perolehan informasi. Penentuan sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai pada titik jenuh seperti dikemukakan oleh Nasution (1996:32-33) bahwa :

untuk memperoleh informasi sampai dicapai taraf “*redundancy*” ketentuan atau kejenuhan artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang dianggap berarti.

Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pengumpulan data dari responden didasarkan pada ketentuan atau kejenuhan data dan informasi yang diberikan. Apabila dari beberapa responden yang dimintai keterangan diperoleh informasi yang sama, maka itu sudah dianggap cukup untuk proses pengumpulan data yang diperlukan, sehingga tidak perlu meminta keterangan dari responden berikutnya.

D. Validitas Data

Penelitian kualitatif sering sekali diragukan terutama dalam hal keabsahan datanya (validitas data). Oleh sebab itu, dibutuhkan cara untuk memenuhi kriteria kredibilitas data. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengusahakan agar

kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya, dalam penelitian ini cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. memperpanjang masa observasi

Untuk memeriksa absah tidaknya suatu data penelitian perpanjangan masa observasi peneliti di lapangan akan mengurangi kebiasaan suatu data karena dengan waktu yang lebih lama di lapangan. Peneliti akan mengetahui keadaan secara mendalam serta dapat menguji ketidakbenaran data, baik yang disebabkan oleh diri peneliti itu sendiri ataupun oleh subjek penelitian.

Usaha peneliti dalam memperpanjang waktu penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang *shahih* (valid) dari sumber data adalah dengan meningkatkan intensitas pertemuan dan menggunakan waktu se-efisien mungkin. Misalnya pertemuan hanya berupa percakapan informal. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih memahami kondisi sumber data.

Peneliti senantiasa memeriksa kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan, dan setiap ada kekurangan data yang dibutuhkan peneliti langsung kembali ke lokasi penelitian untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Misalnya saat peneliti harus mengikuti kegiatan kepesantrenan selama kurang lebih tiga hari dalam seminggu guna menggali informasi yang lebih mendalam secara faktual.

2. pengamatan secara seksama

Pengamatan secara seksama dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan. Peneliti pun

mengadakan observasi atau pengamatan kegiatan mulai dari kegiatan santri dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Di samping itu peneliti pun turut serta mengikuti pengajian bulanan yang dihadiri oleh para alumni dan menjadi bagian dari eratnya hubungan santri pesantren, meskipun sudah tidak lagi menjadi santri.

3. triangulasi

Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber ke sumber lainnya pada saat yang berbeda atau membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber ke sumber lainnya dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengecek atau membandingkan data penelitian yang dikumpulkan. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap informasi yang diberikan oleh kiai, pengasuh pondok pesantren, santri senior, alumni, dan tokoh pemuda sekitar pesantren tentang fokus penelitian agar memperoleh kebenaran atas informasi yang peroleh.

Triangulasi dilakukan peneliti ketika melakukan wawancara dengan responden yang berbeda. Sebelumnya peneliti merangkum, menelaah, dan menganalisis hasil wawancara yang telah diperoleh, ini akan menjadi panduan dan perbandingan dengan responden berikutnya dalam wawancara yang akan dilakukan.

4. menggunakan referensi yang cukup

Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan dan kebenaran data, peneliti menggunakan bahan dokumentasi berupa catatan hasil wawancara dengan subjek penelitian, foto-foto dan sebagainya yang diambil dengan cara

tidak mengganggu atau menarik perhatian informan, sehingga informasi yang diperlukan akan diperoleh dengan tingkat *keshahihan* yang tinggi.

5. mengadakan member check

Seperti halnya pemeriksaan daya yang lain, member check juga dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan data. Member check dilakukan setiap akhir kegiatan wawancara. Di dalam hal ini peneliti berusaha mengulangi kembali garis besar wawancara berdasarkan catatan yang dilakukan peneliti. Member ckeck ini dulakukan agar informasi diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud dengan informan/sumber data.

E. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

Dalam tahap pra penelitian ini yang pertama kali dilakukan adalah memilih masalah dan menentukan judul dan lokasi penelitian dengan tujuan menyesuaikan keperluan dan kepentingan fokus penelitian yang akan diteliti. Setelah masalah dan judul penelitian dinilai tepat dan disetujui oleh pembimbing, peneliti melakukan studi atau observasi pendahuluan untuk mendapatkan gambaran awal tentang subjek yang akan diteliti.

Setelah diperoleh gambaran mengenai subjek yang akan diteliti serta masalah yang dirumuskan relevan dengan kondisi objektif di lapangan, selanjutnya peneliti menyusun proposal penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus menempun prosedur perizinan sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan izin untuk mengadakan penelitian kepada ketua jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, selanjutnya diteruskan kepada Dekan FPIPS UPI melalui pembantu dekan 1 untuk mendapatkan surat rekomendasi dari kepala BAAK UPI yang secara kelembagaan mengatur segala jenis urusan administratif dan akademis,
- b. pembantu Rektor I atas nama Rektor UPI mengeluarkan surat permohonan izin penelitian untuk disampaikan kepada pimpinan pondok Pesantren Fauzan,
- c. surat izin penelitian langsung diserahkan pada bagian administrasi pesantren sebagai permohonan izin melakukan penelitian di tempat tersebut,
- d. konfirmasi pada pihak pesantren terkait izin pesantren sebagai tempat penelitian,
- e. menyiapkan instrumen penelitian dengan membuat terlebih dahulu format wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah tahap pra penelitian selesai, maka penulis mulai terjun ke lapangan untuk memulai penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari responden selain mengumpulkan hasil observasi di lapangan peneliti juga memperoleh data melalui wawancara dengan responden. Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. menentukan responden yang akan diwawancara, sekaligus menghubunginya,
- b. mengadakan wawancara dengan responden yang telah ditentukan,
- c. melakukan studi dokumentasi serta membuat catatan yang diperlukan dan dianggap berkaitan dengan masalah penelitian,
- d. sambil memproses data, penulis juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian,
- e. setelah data didapatkan, maka data tersebut diolah sehingga mendapatkan kesimpulan.

Setelah selesai mengadakan wawancara dengan responden, peneliti menuliskan kembali data yang terkumpul ke dalam catatan lapangan dengan tujuan agar dapat mengungkapkan data secara mendetail. Data yang diperoleh dari hasil wawancara disusun dalam bentuk catatan lengkap setelah didukung oleh dokumen lainnya. Demikian seterusnya sampai peneliti mencatat data pada titik jenuh yang berarti perolehan data tidak lagi mendapatkan informasi yang baru.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Di dalam penelitian ini, pengolahan data dan analisis melalui proses menyusun, mengkatagorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil wawancara, angket, observasi dan studi dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan.

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilaksanakan selama proses penelitian dan diakhir penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (1996:129) bahwa “dalam penelitian kualitatif analisis data harus di mulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan di analisis”. Lebih lanjut mengenai tahapan analisis data ini, Nasution (1996:129) mengemukakan:

tidak ada suatu cara tertentu yang dapat dijadikan pendirian bagi semua penelitian, salah satu cara yang dapat dianjurkan ialah pengikuti langkah-langkah berikut yang bersifat umum yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam pengolahan data dan menganalisis data yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. seleksi data

Seleksi data adalah memilih data yang valid dan erat hubungannya dengan inti masalah. Adapun dalam proses penyeleksian data peneliti memeriksa relevansi dari pertanyaan penelitian dengan data hasil wawancara. Hal ini dilakukan karena dalam kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap kiai, santri senior, alumni, tokoh pemuda yang ada di sekitar lingkungan Pesantren Fauzan, dan para pengasuh ada jawaban yang tidak sesuai dengan masalah yang diteliti. Untuk itu, peneliti memisahkan yang sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang di luar pertanyaan penelitian.

b. reduksi data

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk menyerikan, menggolongkan, mengarahkan hasil-hasil penelitian dengan

memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dengan kata lain, reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini aspek yang direduksi berkaitan dengan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan. Kemudian diuraikan dalam beberapa pokok pertanyaan sebagai berikut:

1. bagaimana pandangan politik pondok Pesantren Fauzan sebagai lembaga agen sosialisasi nilai-nilai politik?
2. bagaimana bentuk sosialisasi nilai-nilai politik di Pesantren Fauzan dalam kaitannya dengan pendidikan politik?
3. bagaimana metode sosialisasi nilai-nilai politik yang diterapkan oleh Pesantren Fauzan dalam upaya pembekalan pendidikan politik kepada santri?
4. media apa yang digunakan Pesantren Fauzan dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik kepada para santri?
5. bagaimana implementasi sosialisasi nilai-nilai politik yang diperoleh para santri dalam kaitannya dengan pendidikan politik?

c. display data

Setelah selesai mereduksi data secara keseluruhan, maka data-data tersebut dibuat dalam satu tabel untuk dibandingkan apakah yang menjadi perbedaan atau persamaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Display data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan akan memberikan gambaran

penelitian yang menyeluruh. Dengan kata lain, penyajian data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungannya. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial.

d. verifikasi/kesimpulan

Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian.

Dengan demikian secara umum proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan (data mentah). Kemudian ditulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Setelah data dirangkum, direduksi, dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Selanjutnya data dianalisis dan diperiksa keabsahannya melalui beberapa teknik. Hal ini sesuai yang diuraikan Moleong (2000:192-195), yaitu :

- a. data yang diperoleh disesuaikan dengan data pendukung lainnya untuk mengungkapkan permasalahan secara tepat;
- b. data yang terkumpul setelah dideskripsikan kemudian didiskusikan, dikritik ataupun dibandingkan dengan pendapat orang lain;
- c. data yang diperoleh kemudian difokuskan pada substantif fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Pesantren Fauzan

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah memberikan banyak kontribusi positif pada masyarakat. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa menurut sebagian para ahli sejarah orang yang pertama kali mendirikan pesantren itu adalah Maulana Malik Ibrahim tepatnya tahun 9 H. Adapun Pondok pesantren Fauzan adalah sebuah pondok pesantren yang terletak di kampung Fauzan RT 01 RW 05 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut. Pondok Pesantren ini mempunyai tempat yang cukup luas dan nyaman, keberadaannya terletak di dataran tinggi di tengah lingkungan masyarakat yang belum begitu padat sehingga tradisi pesantren tetap terjaga. Di samping itu jiwa keikhlasan dalam belajar dan mengajar serta kesederhanaan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu dan beribadah para santri sangat kental sekali. Kesahajaan tercermin dari penampilan santri yang sopan seperti pakaian koko dan kain sarung dan memakai peci bagi santri putra. Sedangkan santri putri mengenakan baju muslim dan kain sarung serta kerudung yang senantiasa mereka pakai sehingga menunjukkan lingkungan yang agamis.

Pesantren ini juga berdiri jauh sebelum negara Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1938. Awal berdirinya pesantren ini yaitu bermula dari perkumpulan beberapa orang yang ingin menggali ilmu lewat seorang kiai yang

bernama Kiai Haji Hasan. Beliau adalah keturunan *mama* Bojong yang sangat berjasa menyebarkan agama Islam khususnya di Kabupaten Garut. Adapun awal mula perintisan Pesantren Fauzan ini tidak serta merta langsung berdiri sebuah pesantren, namun bermula dari didirikannya sebuah Masjid hal tersebut mendorong keingintahuan masyarakat untuk menimba ilmu khususnya tentang agama Islam. Setelah itu barulah didirikan sebuah asrama untuk menampung santri-santri yang ingin belajar agama pada umumnya, ataupun belajar *silat* sebagai bekal untuk pertahanan diri sehubungan waktu dulu Negara Indonesia dalam masa penjajahan Belanda.

Setelah KH Hasan sang pendiri wafat, kemudian perjuangan pesantren ini diteruskan oleh KH Muhammad Hijazi, setelah itu diteruskan oleh KH Hasan Basri yang tidak lain merupakan menantu dari KH Muhammad Hijazi sendiri. Pada saat kepemimpinannya, sudah mulai banyak santri yang mulai menetap di pesantren. Generasi keempat setelah KH Muhammad Hijazi wafat, kemudian kepemimpinan Pesantren Fauzan diteruskan oleh KH Haitami. Beliau adalah adik ipar dari KH Muhammad Hijazi yang wafat ketika berusia 36 tahun. Selanjutnya kepemimpinan pesantren diteruskan oleh KH Muhammad Ishak (Aceng Sasa) dimana beliau dikenal sebagai sosok ulama muda yang cukup disegani. Pada waktu kepemimpinannya beliau adalah orang yang pertama kali mengagas adanya musyawarah ulama di Jawa Barat. Setelah KH Muhammad Ishak wafat kemudian tonggak kepemimpinan selanjutnya diteruskan oleh KH Muhammad yang merupakan adik dari KH muhammad ishak. Dari lima istri beliau memiliki 40 anak dan yang ada sekarang semuanya 28 anak dengan 16 laki-laki dan 12

perempuan, termasuk KH Muhammad Umar A'lam yang sekarang memimpin pesantren. Adapun yang lainnya menyebar di seluruh kabupaten Garut dimana masing-masing terus-menerus bersyiar melanjutkan perjuangan sang ayah dengan mendirikan cabang pondok pesantren.

Adapun pondok Pesantren Fauzan yang tersebar di beberapa daerah diantaranya adalah pondok Pesantren wanita Babakan Fauzan Pondok Pesantren Safinatul Faizin (Fauzan II) Simpang-Cibalong-Garut, Pondok Pesantren Salaman (Fauzan III) Suka Mulya-Sukaesmi-Garut, Pondok Pesantren Al-Faizin (Fauzan IV) Sukaesmi-Garut yang notabene menjadi objek penelitian dan merupakan pusat dari Pesantren Fauzan. Kemudian Pondok Pesantren Bidayatul Faizin (Fauzan V) Cipangramatan-Cikajang-Garut, Pondok Pesantren Mukhtarol Faizin (Fauzan VI), Pondok Pesantren Majelis Ta'lim Mamba'ul Faizin (Fauzan VII) Tambakbaya-Cisurupan-Garut dan Pondok Pesantren Farohan (Fauzan VIII) yang berada di kampung Cintadamai Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Garut

Nama Pesantren Fauzan diberikan oleh KH Umar Basori sekitar 100 tahun yang lalu. Dulu sebelum dikenal dengan nama Fauzan pesantren ini dikenal dengan nama Dawuan atau kampung pasir bokor. Namun seiring perjalanan nama kampung tersebut tenggelam dan sampai sekarang daerah ini dikenal dengan nama Kampung Fauzan yang artinya *bagja* atau mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun mata pencaharian masyarakat daerah sekitar pondok pesantren, pada umumnya adalah petani, dan sebagian kecil lagi adalah pedagang. Kehidupan sehari-hari masyarakat masih menunjukkan ciri hubungan yang akrab, saling mengenal antar sesama warga masyarakat. Disamping itu

masyarakat disana masih memandang tokoh agama (kiai) sebagai panutan, artinya keberadaan kiai menduduki tempat yang strategis dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan beragama, masyarakat sekitar pondok pesantren seluruhnya memeluk agama Islam, atau bisa dikategorikan sebagai pemeluk agama Islam yang “fanatik”.

Dasar penyelenggaraan pendidikan pondok Pesantren Fauzan sama halnya dengan dasar yang dipakai semua pondok pesantren yaitu iman dan pengabdian dalam upaya mencari ridho Allah dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-anbiya ayat 25 yang artinya sebagai berikut: *“...dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tiada Tuhan selain Aku, maka sembahlah oleh kamu sekalian akan Aku”*. Dasar ini pula sesuai dengan fungsi dan fitrah manusia sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariat ayat 56 yang artinya sebagai berikut: *“...dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku”*. Di samping itu seperti sabda Rasulullah SWT yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa: *“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, ia berada dalam perjuangn di jalan Allah sampai ia kembali ke rumah”*. Adapaun tujuan pendidikan di pondok pesantren Fauzan ini adalah *Mardhotillah* atau mencari keridhoan Allah dengan mengintegrasikan kecerdasan fikiran, keluhuran akhlak dan kedalaman spiritual secara sinergis (*tazkiyatul fikri, tazkiyatun nafs, dan tazkiyatur ruh*).

Dalam pondok Pesantren Fauzan, semua urusan berada di tangan kiai sebagai pemimpin Pondok Pesantren. Namun untuk permasalahan tertentu, dalam

hal pengambilan keputusan yang sifatnya untuk kemaslahatan umat seperti ketika menentukan pilihan politik, ataupun dalam urusan yang lainnya, pada umumnya pesantren senantiasa mengadakan musyawarah dengan keluarga besar. Dari semenjak dulu nilai-nilai demokrasi senantiasa di tanamkan oleh Almarhum KH Muhammad baik kepada anak-anak nya ataupun kepada para santri sehubungan dalam hal ini pesantren sangat menyadari kecendrungan masyarakat ataupun santri dan juga para alumni yang seringkali meminta arahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal menentukan preferensi pilihan politiknya.

2. Kegiatan Pendidikan

a. Pendidikan Sekolah

Seiring perjalanan waktu dan tuntutan zaman yang berbeda, saat ini pondok Pesantren Fauzan pun mengikuti perkembangan. Dimulai pada tahun 1986 Pesantren Fauzan mulai mendirikan lembaga pendidikan formal dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Aliyah, dan baru dua tahun ini didirikan Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun faktor-faktor yang mendorong didirikannya sekolah oleh Pesantren Fauzan ini diantaranya yaitu: pertama, pesantren melihat jauhnya tempat pendidikan umum dengan masyarakat. Kedua, dahulu Almarhum KH Muhammad seringkali melihat berbaurnya siswa-siswi sepanjang 7 sampai 8 km melewati jalan yang sunyi untuk menempuh sekolah. Dan yang terakhir adalah bahwa dalam segi pendidikan, pendidikan agama sekarang ini tidak dijadikan prioritas atau pokok dan seringkali hanya sebagai pelengkap saja. Dengan alasan tiga faktor tadi maka pesantren dalam hal ini merasa terpanggil untuk mendirikan lembaga formal (sekolah).

Adapun kurikulum sekolah di pesantren ini pada dasarnya sama dengan sekolah lain pada umumnya. Namun yang membedakan dengan sekolah lain yaitu dari sisi *hidden curriculum* nya dengan memadukan budaya dan nilai-nilai kepesantrenan seperti ceramah sebelum dimulainya pembelajaran, berjama'ah setelah berakhirnya pembelajaran dan *istigosah* untuk para guru dan murid yang dilaksanakan seminggu sekali. Dalam kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah, meskipun lembaga pendidikan itu merupakan bagian dari pesantren, namun dalam segi pembinaan pesantren tidak ikut campur. Dengan kata lain, pesantren menyerahkan sepenuhnya pada kurikulum yang sudah ditentukan oleh sekolah. Akan tetapi dalam hal pengawasan tingkah laku (akhlak), baik di sekolah ataupun dalam masyarakat, selagi siswa tersebut masih berstatus sebagai santri Fauzan maka dimanapun akan terus diawasi.

b. Pendidikan Luar Sekolah (Pesantren)

Pendidikan di pondok Pesantren Fauzan diselenggarakan di madrasah, Masjid, dan rumah ustadz dengan mempelajari kitab kuning. Pendidikan yang diselenggarakan mengacu pada kurikulum pesantren yang dirancang khusus oleh kiai yang memiliki kekuasaan penuh. Adapaun proses pembelajaran atau pendidikan di Fauzan ini yaitu dengan menggunakan sistem tradisional atau klasik dengan memberikan penekanan kepada santri pada pengetahuan agama yang dapat menjadi bekal menuju jalan yang benar dan diridhoi Allah SWT.

Pelaksanaan pendidikan dengan sistem tradisional tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, keteladanan, percontohan, ceramah. Sedangkan dalam pendidikannya menggunakan sistem kitab, karena

melalui pengajaran tersebut para santri dapat belajar agama Islam pada sumber-sumber langsung bahasa Arab. Dalam pelaksanaan pengajian, para santri dibagi dalam beberapa kelas yang disesuaikan berdasarkan tingkat kemampuan santri, dimana tiap kelas berbeda bahasan kajian kitabnya. Usia dalam hal ini tidak menentukan kelas, jika santri yang baru masuk usianya sudah remaja atau dewasa tetapi belum bisa Al-Qur'an sama sekali maka akan satu kelas dengan kelas anak-anak.

Di samping itu, proses pembelajaran atau pengajian antara santri putra dan santri di Pesantren Fauzan ini tidak disatukan, dengan kata lain santri putri dibimbing langsung oleh Ibu pimpinan pondok pesantren dan santri putra dibawah bimbingan pengasuh pondok pesantren yaitu KH Umar A'lam. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pergaulan atau akhlak para santri dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Adapun materi yang diberikan pesantren antara lain mencakup bidang aqidah, syariah dan muamalah. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dari tabel di bawah berikut ini:

No	Yang dipelajari	Nama Kitab
1	Bidang Fiqih	<ul style="list-style-type: none"> - Safinatunaja - Riyadul badi'ah - Fathul qorib - Fathul mu'in - Zubad - Sulam Taufiq - U'qudulujoin

2	Bidang nahwu	<ul style="list-style-type: none"> - Jurumiyah - Kaelani - Imriti - Yaqulu - Al-fiyah - Sofor bina
3	Bidang Tauhid	<ul style="list-style-type: none"> - Tijanud-darori - Aqo'idul iman - Sanusi - Djauhar Tauhid
4	Bidang Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> - Tuhfatul Atfal (Tajwid) - Tafsir Jaelani - Tadarrus Al-Qur'an - Yasinan
5	Bidang Akhlak	<ul style="list-style-type: none"> - Akhlakul banat - Ta'lim Muta'alim
6	Hadist	<ul style="list-style-type: none"> - Hadist arbain - Mukhtarol hadist - Mustholahul hadist - Tafsir jalalen

(Sumber: Pesantren Fauzan)

4.1 Daftar kitab-kitab yang di pelajari di pondok pesantren Fauzan

3. Pendidikan Ekstrakurikuler

Pendidikan ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan yang diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para santri selain dari pelajaran rutin yang harus diikuti. Selain menjadi kawan candra dimukanya para santri dalam menggali dan mengembangkan ilmu agama, kegiatan ekstrakurikuler ini juga dimaksudkan untuk menambah wawasan dan jalinan silaturahmi para santri, baik dengan masyarakat ataupun dengan para alumni. Dalam hal ini Pesantren Fauzan pun mengadakan kegiatan yang mendidik masyarakat sekitar dalam kegiatan rutin berbentuk pengajian. Selain itu untuk mengontrol serta memperkuat jaringan alumni dan juga santri, pesantren mengadakan kegiatan pengajian bulanan bagi seluruh alumni yang diakhiri dengan kegiatan do'a bersama dan sholawatan. Adapun rangkaian kegiatan yang diadakan pesantren yaitu sebagai berikut:

- a. pengajian mingguan bagi bapak-bapak sekitar pesantren se-Kecamatan setiap hari Minggu
- b. pengajian mingguan bagi ibu-ibu setiap hari Jum'at
- c. mengadakan marhabaan dan shalawat mingguan setiap hari Jum'at
- d. mengadakan ziarah dan tawasulan seminggu sekali ke makam para pendiri pesantren setiap hari Jum'at
- e. pengajain bulanan bagi segenap alumni dan masyarakat setiap minggu pertama bulan Qomariyah

- f. mengadakan do'a bersama dan sholawatan bagi alumni dan segenap warga masyarakat setiap satu bulan sekali dalam minggu pertama bulan Qomariyah (bulan islam)

4. Ciri Khas

Pada dasarnya setiap pesantren pasti memiliki ciri khas masing-masing dengan segala keunikan kultur yang berbeda-beda. Ada pesantren yang terkenal dengan kecenderungannya dalam mengkaji ilmu alat, ada pesantren yang dikenal dengan kekhasannya dalam mendalami ilmu Al-qur'an, begitu juga pesantren yang dikenal dengan kekhasannya dalam mengutamakan akhlak dan tidak sedikit juga pesantren yang memadukan berbagai kajian dari mulai kitab, Al-Quran dan yang lainnya.

Pesantren Fauzan dengan kultur budaya *ta'dzim* nya terhadap guru atau kiai memiliki ciri khas yang membedakan dengan pesantren lainnya. Adapun yang sangat menonjol dari pesantren ini adalah bahwa proses pembinaan nilai moral *adab-adaban* (akhlak), baik terhadap guru ataupun terhadap sesama lainnya sangat kental sekali, hal ini memang sudah ditanamkan dari awal didirikannya pesantren tepatnya pada tahun 1870. Selain itu bidang kajian yang menjadi ciri khas pondok pesantren ini yaitu di bidang fiqih, demikian kesan masyarakat lingkungan Fauzan dan sekitarnya. Hal ini terlihat dalam kajian yang mendalam dan luas serta bisa diterima oleh masyarakat baik dalam lingkungan pondok pesantren maupun yang sifatnya pengajian umum, yang berkenaan dengan praktek ibadah *mahdhoh* maupun dalam bidang *muamalah*.

5. Santri, Kyai dan Ustadz/Guru

Santri yang mesantren atau tinggal di Pesantren Fauzan ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Namun sebagian besar santri berasal dari daerah Kabupaten Garut. Sedangkan para pengajar di pesantren ini adalah tidak lain dari keluarga pesantren sendiri dengan rincian sebagai berikut:

a) Jumlah Pengajar

Pada umumnya, para pengajar yang turut serta membina para santri di pondok Pesantren Fauzan berasal dari keluarga besar Fauzan sendiri. Adapun orang-orang yang mengajar dan membina para santri di pondok Pesantren ini adalah seperti yang terlihat pada tabel di bawah berikut ini:

No	Nama	Jenis Kelamin	Status Tugas	TMT
1	K.H.Acengng Aam Umar A'lam	L	Pimpinan Ponpes	1980
2	K.H.Aceng Muhammad 'Ali	L	Pengajar	1992
3	Aceng Dudum Abd Salam	L	Pengajar	1996
4	Aceng Hasan	L	Pengajar	1998
5	Aceng Aip Mukhtar Fauzi	L	Pengajar	1999
6	Aceng Hilman Umar Basori	L	Pengajar	2001

7	Nyimas Hj Nurhayati	P	Pengajar	1986
8	Nyimas Leli Halimah	P	Pengajar	2004
9	Nyimas Ratih Fatimah	P	Pengajar	2005

(Sumber: Pesantren Fauzan)

4.2 Daftar Jumlah Pengajar di Pondok Pesantren Fauzan

b) Jumlah Santri

Jumlah santri yang mesantren di Pesantren Fauzan dalam tiap tahunnya tidak tetap dan selalu berubah. Namun pada saat penelitian berlangsung, jumlah santri putri dan santri putra yang menjadi santri tetap di Pesantren Fauzan adalah seperti dalam tabel berikut di bawah ini:

Uraian	Santri	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Tingkat I	70 orang	50 orang
Tingkat II	40 orang	25 orang
Tingkat III	45 orang	30 orang
Tingkat IV	25 orang	15 orang
Jumlah Total	180 orang	120 orang

(Sumber: Pesantren Fauzan)

4.3 Jumlah keseluruhan santri berdasarkan tingkatan

No	Kelompok peserta	Usia (Tahun)	Jumlah Santri
1	Tingkat I	12-15	120 orang

2	Tingkat II	16-19	65 orang
3	Tingkat III	20-25	75 orang
4	Tingkat IV	25 keatas	40 orang
Jumlah Total			300 orang

(Sumber: Pesantren Fauzan)

4.4 Jumlah keseluruhan santri berdasarkan tingkatan usia

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian dari unsur pesantren yang mutlak diperlukan dalam menunjang program pesantren. Karena sarana dalam hal ini merupakan media untuk mencapai tujuan. Pada saat penelitian berlangsung pondok Pesantren Fauzan sedang membangun asrama untuk santri putra dan aula. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Pesantren Fauzan diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Satuan	Status	Keterangan
1	Bangunan Ponpes : - Asrama putra - Asrama putri - Masjid - WC - Kopontren	2 2 1 1 1	Wakaf Wakaf Wakaf Wakaf Wakaf	Satu dalam proses pembangunan Sedang Sedang Sedang sedang
2	Komputer	1 unit	Milik	Sedang

			Sendiri	
3	Al-Qur'an	250 Unit	Milik Sendiri	Sedang
4	Lapangan Olah Raga	1 unit	Milik Sendiri	Sedang

(Sumber: Pesantren Fauzan)

4.5 Sarana dan Pra sarana di Pondok Pesantren Fauzan

7. Sumber dana dan Usaha Ekonomi

Sumber dana pondok Pesantren Fauzan dari awal berdiri sampai sekarang pada umumnya murni menggunakan sumber dana sendiri, artinya dalam proses pengembangan pembangunan pesantren ini tidak tergantung pada siapapun, termasuk dalam hal ini pemerintah meskipun dalam proses pembangunan yang sedang dibangun sekarang ini, pesantren tidak menapikan bantuan dari pihak pemerintah meskipun masih jauh dikatakan besar. Adapun untuk dana operasional sehari-hari memang sudah ditentukan sumbernya. Misalnya biaya untuk kesejahteraan, kesehatan, dan juga penerangan, santri diminta keikhlasannya untuk membayar sebesar dua puluh ribu tiap bulannya. Adapun ketika ada acara ataupun agenda yang berhubungan dengan pesantren seperti misalnya *rajaban* ataupun *haolan* pesantren, para santri dituntut untuk mandiri dalam mengatur hal-ha yang berhubungan dengan masalah dana.

Adapun sumber dana lainnya diperoleh pesantren dari tanah milik pesantren sendiri, baik sawah ataupun kebun yang dikelola bersama santri, meskipun ada dari beberapa alumni ataupun dari orang yang ingin membantu dalam proses pembangunan pesantren ini. Untuk usaha ekonomi dalam upaya

pembangunan pesantren, sejauh ini masih dalam tahap rencana. Namun sejauh ini pesantren terus-menerus memanfaatkan tanah milik sendiri meskipun belum maksimal dan masih perlu pengembangan yang lebih terencana.

8. Program Pengembangan

Sebagai lembaga pendidikan nonformal yang sudah berpadu dengan lembaga pendidikan formal dengan didirikannya sekolah, tentunya penambahan dan pengembangan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan. Adapun program pembangunan fisik yang sedang diupayakan adalah pada saat sekarang sedang dibangun pondok pesantren putra dan Aula. Sedangkan untuk jangka panjang pesantren sedang ingin mendirikan lembaga pendidikan formal (sekolah) di cabang-cabang Pesantren Fauzan yang tersebar di daerah-daerah. Disamping itu juga pesantren sedang memikirkan bagaimana caranya mengembangkan ekonomi antara pesantren dengan masyarakat sekitar, serta mengupayakan untuk mengembangkan pendidikan dengan didirikannya perguruan tinggi.

Pengembangan non fisik yang sedang diupayakan oleh Pesantren Fauzan diantaranya yaitu dalam bidang kaderisasi dengan mengadakan pengajian keliling ke berbagai daerah serta pengajian seminggu sekali se-Kecamatan. Dengan demikian, diharapkan hal itu akan mendorong terjalinnya komunikasi yang baik dan hubungan yang erat antara masyarakat dan pesantren dalam cakupan yang lebih luas.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan beberapa responden yang menjadi sumber data pada penelitian ini. Disamping itu juga akan diuraikan hasil studi dokumentasi yang turut mendukung terkumpulnya data yang berkaitan dengan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan. Dalam hal ini akan peneliti gambarkan lebih dalam mengenai pandangan pondok Pesantren Fauzan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai politik, bentuk sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik, metode sosialisasi nilai-nilai politik yang diterapkan di pesantren tersebut dalam upaya pembekalan pendidikan politik kepada para santri, kemudian terkait media yang digunakan Pesantren Fauzan dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik kepada para santri serta bagaimana implementasi sosialisasi nilai-nilai politik yang diperoleh para santri dalam kaitannya dengan pendidikan politik.

Proses wawancara peneliti lakukan dengan cara tatap muka langsung dengan para responden sebagai informan. Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara disesuaikan dengan kesediaan responden termasuk dalam hal penentuan kapan dan dimana mereka dapat peneliti wawancara. Dalam prosesnya, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada masing-masing responden khususnya dengan pengasuh pondok pesantren yang memberikan begitu banyak informasi terkait mengenai penerapan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan. Adapun yang menjadi informan dalam pelaksanaan wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut:

7. K.H Aceng Umar A'lan selaku pimpinan Pondok Pesantren Fauzan (AU)
8. Aceng Wahid sebagai pengasuh Pondok Pesantren Salaman yang merupakan cabang dari pondok Pesantren Fauzan, disamping itu beliau juga pernah aktif dalam politik praktis sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut (AW)
9. Aceng Mujib sebagai bagian pengasuh pondok Pesantren Salaman (cabang Pesantren Fauzan) dan aktif juga pada tataran politik prtaktis (AM)
10. Saefulloh S.Pd sebagai tokoh pemuda di Desa Sukaresmi (SH)
11. Bapak Ustadz Memen sebagai perwakilan alumni pondok Pesantren Fauzan (UM)
12. Oob Abdurrohman perwakilan dari santri yang notabene sebagai *rois* (yang dituakan) di pondok Pesantren Fauzan (OA)

Sehubungan dengan besarnya keluarga besar Fauzan, yang tersebar di beberapa daerah maka untuk mendapatkan informasi dan data mengenai sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan pun peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan para responden yang berada di lokasi yang telah peneliti tetapkan saja, akan tetapi peneliti pun melakukan wawancara dengan responden yang tempatnya cukup jauh

dari lokasi penelitian. Adapaun wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren peneliti lakukan langsung di rumah tinggalnya, kemudian dengan responden kedua yang merupakan pimpinan pondok Pesantren Salaman cabang dari Pesantren Fauzan peneliti lakukan di rumah tinggalnya juga tepatnya di kampung Sukamulya-Garut. Dengan responden ketiga peneliti melakukan wawancara di rumah tinggal salah satu pengasuh Pondok Pesantren Fauzan ketika didakannya pengajian bulanan yang rutin diadakan pesantren. Responden keempat yaitu perwakilan dari tokoh pemuda Desa Sukaresmi yang juga salah satu Guru di yayasan Al-Faizin, wawancara dilakukan di sekolah. Selanjutnya responden dari perwakilan salah satu alumni yang mana proses wawancara peneliti langsung mendatangi kediamannya di Jalan Surapati-Singajaya-Garut dengan jarak yang cukup jauh dari tempat penelitian. Dan yang terakhir wawancara dengan perwakilan dari santri yang dilakukan di rumah kediaman bagian dari pengasuh Pondok Pesantren. Dan untuk menguraikan hasil wawancara dengan para responden di atas, akan diuraikan pada bagian berikutnya secara terperinci dan mendalam.

1. Pandangan Politik pondok Pesantren Fauzan Sebagai Lembaga Agen Sosialisasi Nilai-Nilai Politik

Mengenai pandangan politik Pesantren Fauzan yang notabene sebagai bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai politik semua responden memandang bahwa politik itu penting. Hal ini seperti yang dikatakan AU bahwa pandangan pesantren terhadap sosialisasi politik dalam hubungannya dengan pendidikan politik memandang sangat perlu. Alasannya karena kalau pesantren tidak terjun langsung

dalam dunia politik maka pesantren akan terjebak dan termakan oleh politik itu sendiri. Adapun sosialisasi nilai-nilai politik yang ditanamkan pesantren disini, tentunya nilai-nilai yang didasari dengan pembinaan moral dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam segala hal, baik dalam kapasitasnya sebagai insan Tuhan, insan sosial termasuk dalam kapasitasnya sebagai insan politik. Hal senada dikemukakan oleh AM sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi *Qowamuddunya biarba'ati Asya'a* yang artinya: berdirinya dunia adalah tiada lain yaitu dengan empat perkara: pertama, dengan ilmunya ulama, kedua dengan adilna pemerintah, ketiga dengan dermawannya orang-orang kaya, dan yang terkakhir yaitu dengan do'a orang-orang fakir. Dalam hal pandangan politik Pesantren Fauzan, bahwa politik tidak akan berdiri tegak di dunia manakala tidak seimbang dalam membangun hubungan antara ulama dengan *umara* dalam hal ini pemerintah.

Adapun yang melatarbelakangi pandangan pesantren mengenai urgensi politik itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh AU bahwa pandangan tersebut dilatarbelakangi karena Pesantren Fauzan dari sebelum dan sesudah merdeka pun selalu berupaya memandang jauh ke depan. Artinya bahwa bagaimana pun pesantren adalah bagian dari potensi pemerintah yang mau tidak mau pesantren sendiri pun harus mengikuti irama pemerintahan yang berjalan, namun jangan terlalu depan ataupun terlalu belakang. Pendapat lain dikemukakan oleh UM yang mengatakan bahwa yang melatarbelakangi pandangan pentingnya politik bagi kehidupan yang pasti Pesantren Fauzan dalam hal keterlibatan dan kepeduliannya akan politik, bukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi Pesantren Fauzan

memandang penting politik karena ingin menjembatani, dalam pengertian ingin sama-sama membantu pemerintah untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini UM mengatakan bahwa Pesantren Fauzan senantiasa mengutamakan pembangunan seperti apa yang diamanatkan lagu kebangsaan kita: "bangunlah jiwanya bangunlah badannya". Artinya bahwa sebelum kita menghendaki pembangunan dalam arti fisik hal yang harus diutamakan dulu adalah jiwanya, atau akhlaknya. Disinilah potensi pesantren yang dari sejak dulu dikenal sebagai tempat pembentukan akhlak atau moral generasi bangsa.

Masih mengenai alasan yang melatarbelakangi pandangan pentingnya politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik dari sudut pandang berbeda dikemukakan AW bahwa pesantren dalam hal ini menyadari dalam kehidupan itu harus ada aturan, harus ada pelaku aturan, kemudian pelaksana aturan yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dan untuk menciptakan suasana yang harmonis maka unsur-unsur tersebut haruslah sinergis dan saling mendukung, termasuk dalam hal ini pesantren sebagai bagian dari potensi negara dan merupakan bagian dari pelaksana aturan. Karena apapun kalau diluar aturan maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik, artinya disini pesantren membutuhkan sebuah Undang-Undang atau norma dan juga membutuhkan pelaku yang legal.

Terkait apakah Pesantren Fauzan berpolitik atau tidak, kemudian pendidikan politik dalam pengertian seperti apa yang diterapkan di Pesantren Fauzan, menurut AM bahwa kalau ditanya Pesantren Fauzan berpolitik atau tidak, yang harus digaris bawahi disini adalah bahwa Pesantren Fauzan tentunya bukanlah partai politik, tapi Pesantren Fauzan adalah bagian dari lembaga

pendidikan. Akan tetapi karena dasar berpolitik pesantren yaitu untuk demi kemaslahatan umat, maka selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan syariat Pesantren Fauzan bukan hanya ikut andil tapi siap berada di depan. Seperti itulah pengertian pendidikan politik pesantren ini. Pernyataan senada dikemukakan SH mengenai masalah berpolitik atau tidak, Pesantren Fauzan yang pasti bukanlah lembaga politik, akan tetapi lembaga pendidikan yang memang tidak menapikan arti penting politik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pendidikan politik disini sambil berjalan aja, dalam artian di dalam kehidupan sehari-hari tidak mencolok tetapi ketika pesta demokrasi aktivitas politik itu baru menonjol dan semua itu dilakukan tanpa ada paksaan. Adapun jawaban lain dikemukakan oleh UM yang mengatakan bahwa Pesantren Fauzan dari semenjak dulu memang senantiasa turut serta dalam memajukan dunia perpolitikan. Dengan kata lain, pesantren senantiasa berupaya turut serta membantu pemerintah untuk memajukan nilai-nilai demokrasi yang sejak dulu memang sudah ditanamkan. Akan tetapi politik dalam pengertian disini, adalah politik yang sekiranya tidak merusak citra pesantren dan bukan pula politik dengan memperjual belikan agama untuk keuntungan semata.

Meskipun para responden mempunyai pandangan yang berbeda dalam mengutarakan alasan atau hal yang melatarbelakangi pentingnya politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik tersebut, namun intinya hampir semua responden tidak menapikan arti penting politik dalam kehidupan manusia. Kemudian terkait pesantren berpolitik atau tidak pernyataan diatas kiranya bisa merepresentasikan tanggapan dari para responden yang hampir semua

mengisyaratkan bahwa pesantren pada dasarnya senantiasa ingin hidup berdampingan dengan *umara* dalam hal ini pemerintah, dan disamping karena dari sejak zaman sebelum merdeka dulu pesantren sudah terkondisikan ikut berjuang membangun politik maka sampai saat ini pun pesantren senantiasa berusaha menjembatani anatar masyarakat dan pemerintah

2. Bentuk Sosialisasi Nilai-Nilai Politik di Pesantren Fauzan dalam Kaitannya dengan Pendidikan Politik

Menurut SH secara umum bentuk sosialisasi yang dilakukan khususnya masyarakat disini pada umumnya mendapat sebagian informasi yaitu dari media masa. Ketika pesantren menyampaikan sosialisasi politik, pihak pesantren menjelaskan secara umum mengenai apa yang menjadi dasar pesantren dalam memilih. Adapun penyampaiannya itu dilakukan secara religi. Intinya bentuk sosialisasi yang diterapkan oleh pesantren tidak hanya disampaikan langsung secara religi melalui pengajian yang diadakan, akan tetapi secara tidak langsung juga seperti halnya disekolah para santri terlibat dalam OSIS itu juga kan sudah termasuk bentuk sosialisasi. Kemudian AU mengatakan dengan lebih gamblang bahwa bentuk sosialisasi di pesantren dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun penerapannya yang pertama melalui pengajian yang diadakan pesantren seminggu sekali. Dalam pengajian tersebut dihadiri oleh masyarakat sekitar se-wilayah Kecamatan. Kemudian pengajian bulanan yang dihadiri oleh masyarakat dan para alumni yang ada di berbagai daerah. Ada lagi pengajian 6 bulan sekali biasanya dalam bulan Syawal dan Maulid Nabi. Dan yang terakhir pertemuan itu dalam acara haolan yang merupakan acara terbesar pesantren dalam

mengenang Almarhum *pangrsa* yang telah begitu berjasa mengembangkan pesantren dan juga turut serta membangun penanaman nilai-nilai politik baik di pesantren ataupun di luar pesantren.

Kemudain menurut AM yang mengutarakan bahwa sosialisasi di Pesantren Fauzan nampaknya cenderung melakukan sosialisasi yang sifatnya langsung. Adapun bentuknya seperti apa dan bagaimana biasanya sosialisasinya itu berupa pemberian penyuluhan, penjelasan, ajakan, arahan politik yang akan membangun negara, karena semua itu merupakan kewajiban pendidikan pesantren. Jadi, sosialisasi dengan cara langsung memang lebih sering digunakan oleh pesantren meskipun tidak menegasikan pemberian sosialisasi secara tidak langsung. Lebih lanjut AM mengatakan terkadang sosialisasi tidak langsung juga tetap diterapkan, hal itu ditanamkan atau bisa kita lihat dalam menjalankan nilai-nilai politik dalam kehidupan sehari-hari dengan mendukung program pemerintah yang ada kaitannya dengan pesantren seperti menjaga sinergisitas dengan kepala desa dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bentuk sosialisasi nilai-nilai politik yang diterapkan di Pesantren Fauzan, semua responden mengatakan hal tersebut sangat berkorelasi atau berkaitan erat dengan tujuan dari pendidikan politik yang ingin dicapai. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan SE bahwa apapun harus disesuaikan dengan tujuan, namun berbicara masalah tujuan, ketika dikaitkan dengan sosialisasi baik kepada para santri maupun kepada masyarakat semua itu harus disesuaikan dengan budaya pesantren sendiri. Di sisi lain, AW dalam hal ini mengatakan bahwa

sebetulnya menspesialkan pemberian khusus tentang pendidikan politik itu tidak. Namun orang pesantren ketika kiai nya ada langkah tertentu hal itu sudah menandakan petunjuk. Kultur pesantren ketika kita sudah mengambil langkah sesuatu maka otomatis hal itu sudah dianggap para santri ataupun masyarakat sebagai hal yang harus diikuti karena suatu petunjuk perilaku seseorang yang dianggap panutan itu akan lebih kuat dari pada ucapannya. Namun intinya adalah bahwa bentuk-bentuk sosialisasi yang memang diterapkan pesantren ini disesuaikan dengan budaya pesantren.

Adapun tujuan dari pendidikan politik yang ingin dicapai Pesantren Fauzan seperti yang diungkapkan oleh AW yaitu ingin mensejahterakan umat, mengabdikan kepada umat, baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun dalam bidang yang lainnya. Dan dalam hal ini, pesantren merasa merupakan bagian dari potensi bangsa karena kalau tidak melalui politik maka tujuan akan sulit untuk dicapai. Hal senada juga diungkapkan oleh UM bahwa sosialisasi nilai-nilai politik yang ada yaitu tidak lain untuk mensejahterakan umat. Masih terkait tujuan dari sosialisasi nilai-nilai politik, menurut AM mengungkapkan bahwa tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan memberikan satu pemahaman kepada para santri agar memiliki kekuatan-kekuatan utuh dan sempurna dalam rangka mencetak generasi bangsa yang telah disebutkan sebelumnya (generasi yang memiliki kesadaran yang paripurna). Sehingga nanti akan menjadi apa dan bagaimana nya santri, yang penting dia tetap berguna. Baik untuk agama, untuk bangsa dan cakupan yang lebih luasnya untuk Negara. Sementara itu SE mengatakan bahwa tujuan diberikannya sosialisasi yaitu demi tercapainya kebersatuan umat dan

mempersatukan apa yang menjadi dasar perpolitikan pesantren guna menyebarkan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat.

Dalam proses sosialisasi yang diterapkan pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Adapun bentuk sosialisasi yang diterapkan di Pesantren Fauzan termasuk kelebihan serta kekurangannya seperti yang diungkapkan oleh SE bahwa kurangnya yaitu media untuk bisa sampai kepada pemahaman yang utuh, kemudian faktor lingkungan dimana pendidikan masyarakat di sekitar pesantren memang tergolong relatif rendah. Adapun Kelebihannya yaitu bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pesantren diimbangi dengan suatu kharisma dari sosok kiai itu sendiri sehingga masyarakat tidak begitu was-was karena mereka sudah percaya dengan keadaan kegiatan pesantren sehingga informasi yang disampaikan pun otomatis menyebar sampai ke pelosok meskipun tidak disampaikan langsung oleh pesantren. Dengan kata lain, mereka sendiri yang datang ke pesantren untuk meminta arahan untuk disampaikan kepada yang lainnya. Kekurangan dan kelebihan lain dikemukakan oleh AU bahwa kekurangannya yaitu ketika pesantren harus memberikan kepercayaan kepada orang yang belum kita kenal bagaimana agamanya, akhlaknya, termasuk latar belakangnya. Karena kalau melihat seseorang dari segi visi misinya semua memang bagus. Oleh karena itu, dalam hal ini pesantren sangat begitu hati-hati dalam menentukan pilihan politik, karena pesantren sadar bahwa dibelakang itu adalah umat. Kelebihannya dalam hal sosialisasi bisa dikatakan bahwa pesantren tidak begitu mengalami kendala yang berarti karena komunikasi yang dibangun selama ini,

baik dengan masyarakat ataupun para alumni senantiasa pesantren bangun melalui pengajian demi pengajian yang rutin diadakan.

Dari sisi lain kelebihan dan kekurangan bentuk sosialisasi yang dilakukan pesantren dalam kaitannya dengan pendidikan politik dikatakan oleh OA bahwa kelebihannya yaitu bisa senantiasa beriringan dengan ulama. Adapun kekurangan adalah ketika ada sebagian masyarakat yang terkadang berbeda arah, yang pada akhirnya terjadi sedikit perpecahan pada masyarakat itu sendiri. Tetapi kalau untuk santri, sejauh ini tidak ada santri yang berani membantah apa yang sudah diarahkan oleh pesantren. Hal senada dikemukakan oleh UM bahwa dalam kelebihannya pesantren bisa *sauyunan*, satu jalan untuk turut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi pada Negara. Adapun kekurangannya adalah jika terjadi ketidaksesuaian antara apa yang ada dalam hati dengan apa yang diarahkan oleh pesantren, karena bagi santri dan juga alumni pada umumnya beranggapan bahwa *Ridho robbi fi ridho syyaikhi* artinya ridho Allah adalah ridhonya guru. Jadi kalau sudah ada arahan dari pesantren pada umumnya santri ataupun alumni sebagian besar tidak ada yang berani keluar dari arahan yang sudah disosialisasikan oleh pondok pesantren.

Dalam kaitannya dengan pendidikan politik, seperti diketahui bahwa ada dua macam bentuk kurikulum, yaitu *intended curriculum* dan *hidden curriculum*. Adapun bentuk kurikulum yang ada di Pesantren Fauzan adalah bentuk kurikulum yang sifatnya tersembunyi atau disebut dengan istilah *hidden curriculum*. Menurut AU kalau di pesantren, khususnya di Pesantren Fauzan dan mungkin pesantren-pesantren yang lainnya juga pemberian pemahaman tentang pendidikan politik itu

tidak sampai dengan mencantumkan dalam kurikulum yang sifatnya berbentuk *intended curriculum*, walaupun pemahaman itu diberikan kepada santri paling hanya terselip saja pada beberapa kegiatan ataupun pemahanan-pemahaman yang diselipkan lewat proses pembelajaran sehari-hari. Jadi intinya bentuk kurikulum yang ada di pesantren terkait pendidikan politik yaitu bentuk *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi. Hal senada juga diungkapkan AM bahwa pendidikan politik yang diajarkan atau yang ditanamkan di pesantren ini lebih kepada bentuk kurikulum tersembunyi atau yang disebut *hidden curriculum*. Dimana dalam hal ini santri dan masyarakat sama-sama dituntut dan diajak untuk bersama-sama beriringan dalam membangun yang tidak hanya dalam aspek rohani tapi juga segi jasmani.

3. Metode Sosialisasi Nilai-Nilai Politik yang Diterapkan oleh Pesantren Fauzan dalam upaya Pembekalan Pendidikan Politik Kepada Santri

Dalam upaya memberikan pemahaman pendidikan politik, tentu hal yang perlu diketahui adalah terkait bagaimana proses penerapan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik yang diterapkan di pesantren. Adapaun proses penerapan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik diterapkan di Pesantren Fauzan, seperti diungkapkan oleh AM bahwa prosesnya yaitu dengan cara memberikan terlebih dahulu penjelasan teoritis berupa arahan-arahan dan penjelasan mengenai apa yang ingin pesantren sosialisasikan, lalu kemudian apa yang sudah diarahkan itu di awasi dalam pengaplikasiannya agar tidak menyimpang dari apa yang seharusnya. Pendapat selanjutnya dikemukakan SE bahwa penyampaian kepada alumni untuk

menyebarkan mengenai kepesantrenan selanjutnya diharapkan setiap orang untuk ikut berpartisipasi supaya masyarakat atau santri mampu menggunakan haknya sebagai warga negara. Adapun proses penyampaiannya dilakukan ketika pengajian yang diikuti oleh umum.

Pendapat yang masih serupa dikemukakan AU bahwa proses penerapan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik yaitu tiada lain lewat silaturahmi. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa hubungan ataupun komunikasi antara pesantren dan masyarakat senantiasa terjembatani dengan diadakannya pengajian baik mingguan ataupun bulanan. Secara lebih gamblang OA mengatakan bahwa dalam proses penerapan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik pada awalnya pesantren (keluarga besar pondok Pesantren Fauzan) bermusyawarah untuk menentukan pilihan politiknya. Kemudian setelah suara bulat maka hasil musyawarah itu disosialisasikan lewat pertemuan pengajian. Adapun pelaksanaannya yaitu setelah selesai pengajian inilah diselipkan nilai-nilai sosialisasi baik menyangkut permasalahan apapun yang sedang terjadi, termasuk dalam kaitannya dengan politik. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh UM bahwa proses penerapan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik yang diterapkan oleh Pesantren Fauzan, khusus untuk alumni kalau pesantren sudah mengatakan misalnya *merah* maka kami semua pun *merah*.

Dengan tergambarkannya proses penerapan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu terkait penggunaan metode yang digunakan

dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik yang dilakukan. Menurut AU sebenarnya dalam hal politik pesantren tidak mengkhuskan menggunakan metode agar para santri ataupun masyarakat memahami nilai-nilai politik yang harus mereka fahami. Kalaupun ada metode, yang pasti metodenya disesuaikan dengan budaya kepesantrenan seperti dengan metode ceramah, dan suritauladan dan musyawarah. Pernyataan senada dikemukakan oleh AM bahwa metodenya sesuai dengan budaya pesantren, yaitu dengan jalan silaturahmi dan ceramah, reuni, haolan, pengajian mingguan, bulanan, tahunan, yang kesemuanya itu Alhamdulillah sejauh ini turut menjembatani komunikasi pesantren baik dengan santri, para alumni ataupun dengan masyarakat.

Pernyataan yang masih serupa dikemukakan OA bahwa metode nya disesuaikan dengan budaya pesantren. Yaitu dalam bentuk pendekatan personal, ceramah. Contoh misalnya kalau pesantren sudah menentukan pilihannya maka calon tersebut biasanya datang dan diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan diri di depan umum. Namun pernyataan yang berbeda dikemukakan oleh SE yang mengatakan bahwa tanpa menggunakan metode pun mereka mencari informasi sendiri dimana mereka datang ke pesantren untuk meminta pandangan dan informasi langsung ke pesantren. Sedangkan metode menurut UM mengatakan bahwa metodenya yaitu dengan pendekatan personal. Dalam hal ini, agar apa yang disosialisasikan sampai kepada hati masyarakat maka pesantren selalu berusaha mengetahui dulu situasi masyarakat nya seperti apa. Contoh misalnya masyarakat disini tidak suka "makan daging domba", maka pesantren jangan memberikan "daging domba". Seperti itulah kalau harus dianalogikan.

Dari beberapa metode sosialisasi nilai-nilai politik yang ada, metode yang paling efektif memberikan pengaruh terhadap pemahaman pendidikan politik para santri seperti yang diungkapkan oleh AU bahwa berbicara metode yang paling efektif pada dasarnya apapun metodenya yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kultur yang ada baik dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan pesantren sendiri. Namun kalau boleh dikatakan bahwa metode contoh atau suritauladan kiranya menjadi kunci dari pada sosialisasi, tidak hanya sebatas sosialisasi dalam arti politik saja, akan tetapi dalam berdakwah dan menyeru pun kalau tidak mampu memberikan suritauladan yang baik maka jangan harap apa yang diucapkan atau diarahkan di dengar, baik oleh santri, lebih jauh oleh masyarakat". Pendapat senada dikemukakan AM bahwa metode yang paling efektif memberikan pengaruh kepada para santri yaitu dengan metode contoh atau suri tauladan yang baik. Dalam pengertian disini adalah bahwa dalam melakukan proses sosialisasi hal apapun pesantren tidak hanya bicara, akan tetapi serta merta memberi suri tauladan baik kepada santri ataupun kepada masyarakat. Karena bagaimana santri dan masyarakat akan menuruti ataupun menerima apa yang ingin pesantren sosialisasikan kepada mereka kalau pesantren sendiri tidak bisa memberikan contoh akhlak yang baik. Pernyataan yang masih senada dikemukakan juga oleh AM yang mengatakan metode yang paling berpengaruh adalah gerakan nyata atau suritauladan. Artinya kalau kita berbicara, jangan ada perlaku yang tidak sesuai dengan perilaku yang tidak bermuara karena ibadah. Dengan kata lain, jangan karena kita sedang berlaku atau mengerjakan sesuatu yang sifatnya horizontal maka kita meninggalkan hubungan vertikal.

Adapun kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan proses sosialisasi nilai-nilai politik kepada para santri menurut AM kendala yang paling sulit dihadapi dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik kepada santri ataupun masyarakat salah satunya adalah perilaku-perilaku elit politik yang tidak mampu mengaplikasikan nilai-nilai politik sesuai dengan apa yang diharuskan, sehingga terkadang masyarakat juga sebagian antipati atau bahkan tidak mau tau permasalahan terkait politik. Kemudian di sisi lain sarana terkadang menjadi kendala juga, meski memang sejauh ini, hal tersebut tidak terlalu menghambat apapun yang ingin pesantren informasikan atau sosialisasikan kepada santri dan masyarakat. Terakhir kendala sosialisasi nilai-nilai yang ingin kita informasikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pemberian pendidikan politik yaitu latar belakang pendidikan masyarakat itu sendiri. Kendala ini memang menjadi *PR* kita bersama dimana disini peran pemerintah dan juga pesantren sebagai elemen pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya membangun masyarakat yang cerdas dan berbudaya. Ungkapan senada dikemukakan oleh AW bahwa kendalanya yaitu bahwa dalam proses sosialisasi pesantren seringkali dihadapkan pada sikap politik para politikus yang sekarang ini cenderung menodai politik dalam arti sebenarnya. Sehingga dalam proses sosialisasi pun pesantren tidak jarang dihadapkan pada pandangan masyarakat yang sudah antipati terhadap politik.

Kendala dari sudut pandang yang berbeda dikemukakan AU bahwa kendala yang dihadapi pesantren yaitu ketika harus menentukan pilihan dengan orang-orang yang tidak sepenuhnya dikenali. Karena kalau masalah sosialisasi hal itu tidak terlalu menjadi kendala yang berarti, karena terkadang langkah yang

pesantren tempuh, sejauh ini tidak langsung disosialisasikan pun mereka (santri atau masyarakat) dengan sendirinya sudah otomatis mengikuti. Adapun kendala lainnya juga dikemukakan SE dimana kendalanya menurut beliau yaitu latar belakang pendidikan masyarakat yang masih minim, kemudian pemahaman ataupun pendapat dari masyarakat sekitar terkait politik yang berkembang sekarang sehingga mereka apatis meskipun ada juga yang juga yang merespon. Di samping itu juga yaitu kurangnya media untuk melancarkan proses sosialisasi dan yang terakhir adalah letak geografis yang kurang mendukung. Namun kendala dari sisi lain diungkapkan UM bahwa sebagai alumni pesantren yang sudah merasa menjadi bagian dari pesantren sendiri, kendalanya adalah ketika tujuan pesantren tidak sesuai dengan tujuan masyarakat. Hampir senada dengan UM, OA dalam hal ini mengatakan bahwa kendalanya yaitu ketika terjadi sedikit perselisihan paham yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Disamping itu pemahaman masyarakat yang cenderung minim dalam pendidikannya.

Dalam kaitannya dengan pendidikan politik, biasanya indoktrinasi diidentikkan dengan proses sosialisasi politik. Adapun terkait ada tidaknya bentuk indoktrinasi dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik di Pesantren Fauzan menurut AU indoktrinasi yang pasti harus disesuaikan dengan perorangan, dengan lingkungan dan daerah. Artinya ketika dari daerah-daerah bertanya atau meminta arahan pesantren memberikan arahan-arahan umum terkait alasan pesantren dalam menentukan sikap ataupun pilihan, setelah itu mereka bebas mau mengikuti ataupun tidak semuanya disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Adapun langkah

yang pesantren tempuh yang harus diperhatikan, semuanya jangan sampai bertentangan dengan agama dan hukum yang berlaku. Dengan tegas dalam hal ini AM mengungkapkan terkait indoktrinasi yang mewarnai proses sosialisasi, di pesantren Fauzan ini indoktrinasi memang ada, indoktrinasi tersebut dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menjalankan nilai-nilai pendidikan politik baik kepada santri ataupun kepada masyarakat. Pendapat AM dalam hal ini turut menegaskan bahwa indoktrinasi memang ada, namun indoktrinasi yang pesantren lakukan semua itu bukan atas dasar kepentingan ataupun hal-hal yang sifatnya praktis, dalam pengertian disini langkah apapun yang pesantren tempuh semuanya atas dasar agama dan doktrin disini diibaratkan sebagai mutiara di kalangan masyarakat.

Terkait indoktrinasi yang turut mewarnai proses sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik dalam hal ini OA mengatakan bahwa doktrin politik khusus diadakan dari pihak yang memang ditugaskan pesantren dalam menyikapi masalah-masalah terkait politik. Pernyataan tersebut senada dengan yang dikatakan UM dalam hal kaitannya dengan politik dalam arti praktis, misalnya ketika ada pemilu atau sejenisnya, cara sosialisasi pesantren biasanya tidak hanya sekedar diinformasikan tapi disini kita di doktrin semacam di sumpah. Namun hal tersebut memang berdasarkan hasil musyawarah. Berbeda dengan yang dikatakan SE bahwa kalau dari segi doktrin pada dasarnya tidak ada indoktrinasi tetapi kalau melihat dari segi prosentasenya kebanyakan mereka yang meminta arahan pesantren dalam hal apapun, termasuk masalah politik, dan mereka datang sendiri.

4. Media yang Digunakan Pesantren Fauzan dalam Proses Sosialisasi Nilai-Nilai Politik Kepada Para Santri

Dalam kaitannya dengan proses sosialisai nilai-nilai politik, hal yang penting untuk diketahui adalah sarana atau media yang digunakan, dengan kata lain apakah dalam proses sosialisasi disini pesantren menggunakan sarana dan media atau tidak. Terkait dengan hal tersebut menurut AM pesantren memang menggunakan sarana atau media, meski media ataupun sarana yang digunakan mengandalkan sarana yang ada saja karena berbicara masalah sarana pesantren masih terus menerus menerus dalam proses pembangunan menuju perbaikan. Pernyataan AU turut menegaskan bahwa tentunya pesantren menggunakan, meski hanya media yang ada. Karena dari bentuk sosialisasi dikaitkan dengan budaya pesantren media atau sarana yang diperlukan paling hanya berupa tempat dan hal-hal lainnya yang menunjang berlangsungnya ceramah sebagai bentuk daripada sosialisasi. Pendapat yang senada dikemukakan SE yang mengatakan bahwa dalam proses nya memang menggunakan media yang ada, akan tetapi tetap yang di informasikan itu bersifat personal. Pernyataan lainnya juga dikemukakan OA bahwa sejauh ini pesantren tidak menggunakan media seperti halnya di kota-kota. Kalaupun memakai media paling menggunakan media yang ada saja.

Adapun bentuk-bentuk media yang digunakan dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik kepada para santri, alumni ataupun masyarakat menurut AU berbicara tentang media pada dasarnya lembaga pesantren sendiri pun sudah merupakan bagian dari media baik itu untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat ataupun media dalam menjembatani pemerintah dan

masyarakat. Adapun bentuk-bentuk media nya yaitu dengan ceramah, diskusi, musyawarah seperti halnya bentuk sosialisasi yang yang sudah dikatakan sebelumnya. Yang diperlukan sarannya yaitu tempat, dalam hal ini aula, pengeras suara, dan isu permasalahan yang sedang berkembang. Pernyataan tersebut ditambahkan AM bahwa dalam proses sosialisasi yang dilakukan pesantren ini yaitu menggunakan media dengan metode ceramah atau diskusi, baik dengan santri ataupun masyarakat. Dengan kata lain bentuk metode ceramah dan diskusi yang rutin diadakan pesantren dalam hal ini sudah cukup menjadi sarana atau jalan tersampainya informasi yang ingin disampaikan pesantren kepada santri, alumni ataupun masyarakat.

Menurut AW bahwa mengenai bentuk-bentuk media dalam proses sosialisasi yang pasti semuanya tetap perpegang pada ajaran pesantren atau disesuaikan dengan budaya pesantren. Adapun bentuknya seperti yang dikatakan sebelumnya dengan tidak disosialisasikan pun masyarakat ataupun santri sudah serta merta mengikuti langkah atau keputusan yang serta merta mereka ikuti. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa media yang diperlukan pesantren dalam hal ini lebih kepada media yang menunjang diadakannya berbagai pengajian yang rutin diadakan pesantren. Seperti yang diungkapkan UM bahwa bentuk-bentuk media di pesantren yang dibutuhkan yaitu bentuk media yang berkaitan dengan sarana-sarana yang diperlukan ketika diadakannya pengajian-pengajian. Baik itu pengajian mingguan, bulanan ataupun pertemuan 6 bulan sekali yang dihadiri oleh para alumni, masyarakat dan santri. Adapun medianya baik untuk alumni, santri ataupun masyarakat ada televisi untuk mendapatkan perkembangan politik yang

terjadi sebagai tambahan informasi selain yang didapatkan oleh pesantren. Ditambahkan SE bahwa media yang digunakan pesantren adalah media informasi yang disampaikan secara personal.

Bentuk media yang paling efektif dan sesuai dengan budaya pesantren ini, dalam kaitannya dengan proses sosialisasi politik menurut AU berhubung di pesantren ketika diadakan sosialisasi pun hanya melalui pengajian yang sebelumnya diadakan musyawarah paling dengan suritauladan yang baik hal itu sudah menjadi media paling efektif dalam proses sosialisasi. Pernyataan selanjutnya dikemukakan UM media yang paling efektif yaitu yang sesuai dengan budaya santri. Sejauh ini dengan pendekatan personal dan jalinan silaturahmi yang dibangun pesantren cukup menjadi media sosialisasi dalam kaitannya dengan pendidikan politik. Media yang efektif lainnya menurut AW bentuk nya yaitu biasanya dalam bentuk forum dakwah dan silaturahmi yang diadakan pesantren. Karena biasanya kultur yang ada dimana ada pertemuan terkait keagamaan baik yang diadakan oleh pesantren maupun yang diadakan di daerah-daerah disitu ada ulama. Hal senada dikemukakan AM bahwa bentuk media yang paling efektif disini jika dikaitkan dengan budaya yang ada adalah dengan menggunakan bentuk ceramah.

Diperlukannya media dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik menurut AU apapun yang dilakukan pastinya memerlukan instrumen ataupun sarana untuk mencapainya. Adapun mengapa media dibutuhkan dalam proses sosialisasi tentunya untuk mempermudah sampai kepada tujuan. Pernyataan senada dikemukakan AW

bahwa Jelas media dibutuhkan. Karena dalam hal ini media merupakan sarana penjabaran dari pada tujuan yang ingin dicapai. Artinya bahwa apapun tujuan pesantren untuk supaya orang lain tahu maka harus di sampaikan kepada masyarakat lewat media, baik bentuknya alami atau modern”. Diperlukannya media OA mengemukakan karena tanpa media atau sarana yang baik dan representatif pasti menyebabkan daya tarik masyarakat terhadap pesantren kurang. Jadi walaupun pesantren menggunakan media dalam hal sosialisasi tentang apapun, ya tentu medianya disesuaikan lah dengan budaya pesantren yang ada.

5. Implementasi Sosialisasi Nilai-Nilai Politik yang Diperoleh Para Santri dalam Kaitannya dengan Pendidikan Politik

Eksistensi para santri dalam kehidupan politik baik di lingkungan pesantren maupun diluar pesantren dikatakan AM “eksistensi politik para santri dalam kehidupan politik khususnya di lingkungan pesantren pada umumnya para santri cukup disiplin mengikuti arahan ataupun ajakan pesantren. Karena dalam hal ini pesantren tidak hanya asal mengarahkan atau mengajak kepada para santri dan masyarakat saja, akan tetapi pesantren bertanggung jawab atas apa yang disosialisasikan. Bukan hanya sekedar ngomong akan tetapi disertai pengamalan”. Pernyataan dari sudut pandang lain dikemukakan AM bahwa eksistensi para santri dalam menyikapi politik dalam kehidupan lingkungan pesantren ataupun diluar pesantren, santri menyikapinya sangat beragam. Oleh karena itu eksistensinya pun beragam pula. Namun keberadaan santri dimanapun dan menjadi apapun pesantren senantiasa mengamanahkan untuk menjaga akhlak.

Eksistensi lainnya digambarkan oleh SE bahwa eksistensi para santri dilihat dari segi pemahaman mereka terhadap perpolitikan, dalam hal ini mereka menyesuaikan antara perpolitikan itu dengan pendidikan yang mereka peroleh, terutama kegiatan pendidikan pesantren. Namun dari pemilihan OSIS terlihat antusiasme, ketika ada pemilihan mereka begitu bersemangat dalam memberikan partisipasinya. Pernyataan senada dikemukakan OA eksistensi para santri dilingkungan pesantren dalam mengaplikasikan nilai-nilai politik selain lewat organisasi OSIS ataupun ekstra kulikuler lainnya, santri juga dilibatkan membanatu pesantren dalam mensosialisasikan politik pada masyarakat sekitar. Adapun di luar lingkungan pesantren biasanya santri diberi amanah tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi pada keluarga. Namun pandangan lain dikemukakan UM bahwa keberadaan para santri dalam kehidupan politik cenderung masih kurang, dalam artian sebagian besar partisipasi para santri dalam hal politik hanya sebatas memberikan suara ketika pemilu atau sejenisnya diadakan. Adapun di dalam lingkungan pesantren biasanya santri dilibatkan dalam sosialisasi sebatas lingkungan masyarakat sekitar saja. Pesantren sebagai bagian lembaga pendidikan tentunya tidak membantu mencetak kader atau santri yang *eksis* dalam dunia politik, akan tetapi pesantren memang mempunyai peran yang luar biasa untuk memberikan pemahaman-pemahaman dasar terkait nilai-nilai politik. Seperti yang diungkapkan AU bahwa eksistensi para santri pada akhirnya semua diorientasikan untuk memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap terhadap diri sendirinya, pada keluarga, agama lebih luasnya tanggung jawab pada bangsa dan Negara. Dan yang menjadi arahan pesantren baik ketika santri hidup

dalam lingkungan pesantren dalam eksistensinya dalam lingkungan masyarakat adalah bahwa mereka harus memiliki akhlak, karena akhlak merupakan hal yang sangat penting. Adapun eksistensi santri dalam kehidupan politik kalau di lingkungan pesantren mereka turut mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tapi kalau diluar lingkungan pesantren eksistensinya para santri masih kurang begitu menonjol.

Adapun kecenderungan preferensi politik para santri ketika adanya Pemilu (baik Pemilu lokal ataupun sejenisnya) menurut AW kecenderungan preferensi politik, santri dalam hal ini secara aplikatif gamblang saja sekalipun menyikapi politik tetap harus punya nyali yang tidak mengubah tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Namun pada intinya sudah dikatakan sebelumnya bahwa santri di pesantren ini serta merta mengikuti langkah yang diambil pesantren. Hal senada dikemukakan AM kecenderungan preferensi politik baik para santri ataupun masyarakat disini mereka senantiasa mengikuti apa yang diarahkan oleh pesantren, sekalipun pesantren tidak mengarahkan ataupun mengajak secara langsung harus begini ataupun begitu. Artinya ketika santri ataupun masyarakat tau arah kita kemana, tidak diarahkan oleh kita pun mereka mengikuti dengan sendirinya. Adapun kalau ada santri yang tidak mengindahkan arahan ataupun ajakan kita sekali-kali diberi sanksi dimana sanksinya yaitu berupa teguran saja". Di samping itu gambaran preferensi lainnya dikemukakan OA bahwa kecenderungan hampir semua santri disini *Sami'na wa atona*. Dalam artian tidak ada yang berani menentang terang terangan terhadap apa yang dikatakan oleh guru dalam hal ini *pangrsa* (sebutan untuk pimpinan pesantren). Karena kalau

tidak menuruti *pangrsa* ada istilah dikhawatirkan nanti *kwalat* dari guru. Arahan tersebut karena memang kecendrungan nya dalam hal apapun masyarakat ataupun santri senantiasa meminta petunjuk kepada kesantren. Seperti yang diungkapkan AU bahwa kecendrungan preferensi politik para santri ketika adanya Pemilu pada ataupun sejenisnya disini biasanya para santri ataupun alumni selalu minta arahan atau petunjuk dari pesantren.

Dalam kaitannya dengan sosialisasi nilai-nilai politik pondok pesantren biasanya seringkali didatangi oleh calon-calon pejabat yang ingin duduk di pemerintahan untuk meminta dukungan. Adapun sikap pesantren termasuk para santri menanggapi hal tersebut dikatakan AU sikap pesantren kepada siapapun yang datang tentunya turut mendo'akan. Kalau sekiranya manfa'at dan faedahnya akan lebih besar dari pada *madharatnya* pesantren mendo'akan semoga diberikan jalan yang lancar. Namun apabila akan menjadikan *darurat* dan *madharat*, baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, agama dan negara maka pesantren mendo'akan semoga ada jalan lain yang lebih baik. Hal senada dikemukakan AM bahwa datang nya calon-calon pejabat yang ingin duduk di pemerintahan baik itu yang ingin menjadi kepala daerah ataupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang pasti pesantren bersikap terbuka. Artinya bagi siapapun yang datang ke pesantren, bagaimanapun orangnya dan apapun tujuannya kita mempersilahkan dengan tangan terbuka, *bangsrat* aja diterima apalagi ini yang bermaksud baik. Pernyataan tersebut ditegaskan AW yang menyatakan pesantren secara umum *well come* saja pada siapapun juga. Kemudian biasanya karena mereka meminta doa pesantren. Dalam hal ini pesantren mendo'akan kepada siapapun yang

penting tujuannya untuk kemaslahatan umat. Namun dalam hal dukungan sikap pesantren pasti konsisten.

Mengenai ada tidak nya doktrin atau pengaruh kiai dalam penentuan preferensi politik para santri menurut AU doktrin memang ada, akan tetapi meski pesantren tidak memberikan doktrin secara langsung namun setiap langkah kita biasanya dengan otomatis diterjemahkan sebagai sesuatu hal yang harus diikuti dan dipatuhi. Hal itu senada dengan apa yang diungkapkan AW bahwa sudah jelas dari apa yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa langkah kiai dalam hal ini pesantren tidak disosialisasikan pun masyarakat atau santri sudah dengan otomatis menterjemahkan semua itu sebagai perintah yang harus diikuti. Jadi pengaruhnya bukan ada lagi, tapi sangat kuat. Pernyataan lebih tegas dikemukakan AM bahwa pengaruh atau doktrin kiai di pesantren ini sangat kuat, sekalipun tidak langsung.

Sejalan dengan itu OA mengatakan bahwa doktrin atau pengaruh kiai dalam preferensi politik ada dan sangat berpengaruh sekali. Para santri disini pada prinsipnya “*sudah kumaha guru*” karena para santri disini patuh terhadap guru. Pernyataan tersebut diperkuat dengan apa yang dikatakan UM mengenai adanya doktrin, prosesnya ada yang datang sendiri langsung ke pesantren dan ada juga yang di panggil. Yang pasti kalau untuk urusan politik praktis, tempatnya itu di salaman (cabang Pesantren Fauzan) namun untuk masalah pendidikan kepesantrenan dan ke NU-an tempatnya di Fauzan. Berbeda dengan apa yang ungkapakan UM, SE dalam hal ini menyatakan bahwa tidak ada doktrin, akan tetapi sitem penyampaian nya yaitu ketika pesantren menentukan pilihan

politiknya terhadap si A, maka kepada siapa saja yang bertanya pesantren menyampaikan dasar-dasarnya. Masalah mengikuti atau tidaknya dikembalikan pada masing-masing. Namun sejauh ini ketika mereka mengetahui informasi tentang pesantren, tidak bertanya pun atau tidak disosialisasikan pun mereka sudah ikut dengan sendirinya. Seperti itulah doktrin yang mewarnai pondok Pesantren Fauzan. Berdasarkan apa yang dikatakan sebagian besar responden, bisa disimpulkan bahwa indoktrinasi dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan ini memang ada.

C. Analisis Hasil Penelitian

Setelah peneliti menyetengahkan hasil penelitian selama beberapa bulan, langkah selanjutnya adalah mengkaji dan menganalisis hasil penelitian yang diperoleh berhubungan dengan “Sosialisasi Nilai-Nilai Politik dalam Kaitannya dengan Pendidikan Politik di Pesantren Fauzan”. Supaya lebih fokus dalam menganalisis hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka analisis hasil penelitian ini dibatasi terhadap beberapa permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Dalam hal ini, terdapat lima hal penting yang akan dibahas, yaitu pertama, mengenai bagaimana pandangan politik pondok Pesantren Fauzan sebagai lembaga agen sosialisasi nilai-nilai politik. kedua, bagaimana bentuk sosialisasi nilai-nilai politik di Pesantren Fauzan dalam kaitannya dengan pendidikan politik. Ketiga, tentang bagaimana metode sosialisasi nilai-nilai politik yang diterapkan oleh Pesantren Fauzan dalam upaya pembekalan pendidikan politik kepada santri. Keempat, media apa yang digunakan Pesantren Fauzan

dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik kepada para santri. Dan terakhir mengenai bagaimana implementasi sosialisasi nilai-nilai politik yang diperoleh para santri dalam kaitannya dengan pendidikan politik.

Berdasarkan kelima permasalahan tersebut dapat diketahui suatu pola atau proses sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan. Oleh karena itu, dalam pembahasannya perlu pengkajian serta analisis secara objektif dan mendalam sesuai dengan realitas yang terjadi dalam kehidupan pesantren. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam interpretasi, digunakan berbagai referensi pendapat dari beberapa pakar atau ahli yang relevan dan menunjang terhadap pembahasan fokus permasalahan yang diteliti serta terhadap data-data yang sudah diperoleh.

1. Pandangan Politik pondok Pesantren Fauzan Sebagai Lembaga Agen Sosialisasi Nilai-Nilai Politik

Politik merupakan ilmu yang menjelaskan tentang kepentingan, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Di samping itu, ada juga yang mengatakan bahwa politik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara meraih, merebut atau mempertahankan kekuasaan. Kedua pengertian politik tersebut jika dikaitkan kenyataan yang ada, memang ada saja perilaku para aktor politik yang terkadang menodai hakikat politik itu sendiri. Dengan kata lain, proses dalam memperoleh kekuasaan itu terkadang mereka peroleh melalui upaya politik kotor dengan menghalalkan segala cara demi melanggengkan atau meraih kekuasaan. Fenomena seperti itu, pada akhirnya menimbulkan pandangan dari masyarakat atau kelompok tertentu yang tidak mau tahu atau bahkan sikapnya

yang apatis terhadap politik. Seperti yang dikatakan AW yang mengatakan bahwa pada dasarnya politik tidak jauh beda dengan sebuah cara atau alat untuk mencapai tujuan. Namun apabila politik tidak mendapat intervensi atau payung spirituitas dari agama maka politik itu akan kotor, karena memang untuk menggolk-an sebuah tujuan akan diikhtiarkan dengan segala cara

Di sisi lain sebagaimana diungkapkan Irfan Helmy (2007) mengenai berpolitik menurut Islam yang mengatakan bahwa berpolitik pada dasarnya merupakan implementasi dari segenap konsepsi dan persepsi yang mulanya mengental dari dunia batin dalam kenyataan. Bila demikian adanya, apa yang selama ini diklaim bahwa politik itu kotor lalu umat Islam harus menjauhinya, sama sekali hal tersebut tidak memiliki alasan yang mendasar. Hal ini memang memerlukan sebuah upaya atau ikhtiar agar politik yang dicap kotor itu diubah dengan memberi wawasan serta aspirasi agama, sehingga umat Islam tidak lagi takut mendengar kata politik.

Dalam hal ini Pesantren Fauzan sebagai lembaga edukatif dan dakwah yang mempunyai fungsi religius (*diniyyah*), fungsi sosial (*ijtimaiyyah*), dan fungsi edukasi (*tarbiyyah*) berpandangan bahwa politik itu sangat penting untuk dipelajari. Adapun makna atau pandangan pesantren terhadap sosialisasi politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa semua responden pada intinya memandang bahwa politik itu penting. Pandangan tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi *Qowamuddunya biarba'ati Asya'a* yang artinya: Berdirinya dunia adalah tiada lain yaitu dengan empat perkara, yaitu pertama dengan ilmunya

ulama, kedua dengan adilnya pemerintah, ketiga, dengan dermawannya orang-orang kaya, dan yang terkakhir yaitu dengan do'a orang-orang fakir. Adapun dasar yang lainnya bahwa politik tidak akan berdiri tegak di dunia manakala tidak diimbangi dalam membangun hubungan antara ulama dengan *umara*, yaitu pemerintah.

Islam dalam politik pada dasarnya mempunyai titik singgung yang kuat bila keduanya dipahami sebagai sarana untuk menata hidup manusia secara menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan sebagai sarana “kedok” atau alat “legitimasi” terhadap kekuasaan dan dipahami sebagai sarana perjuangan untuk menduduki struktur kekuasaan. Politik yang hanya dipahami demikian pada akhirnya memang akan mengaburkan makna dan menutup kontribusi Islam terhadap dunia politik. Dengan demikian, seharusnya Islam perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi kultural dan kerangka paradigmatik dalam pemikiran politik.

Di sinilah letak urgensi politik bagi kehidupan manusia, termasuk dalam hal ini santri sebagai bagian dari warga Negara Indonesia. Politik dalam pengertian disini adalah suatu pendidikan politik yang memberikan proses penyadaran kepada santri akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, bukan hanya sebagai insan Tuhan. Pesantren yang merupakan bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik mempunyai peran yang sangat strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai politik yang sesuai dengan harapan kebutuhan dan dinamikanya, sehingga pesantren mampu mengisi serta mengimbangi perkembangan politik yang terjadi dalam

masyarakat. Seperti yang diungkapkan Aceng Umar A'lam bahwa sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik itu pesantren memandang sangat penting. Adapun sosialisasi nilai-nilai politik yang ditanamkan pesantren adalah nilai-nilai yang didasari dengan pembinaan moral dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam segala hal, baik dalam kapasitasn sebagai insan Tuhan, insan sosial, maupun insan politik.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa Pesantren Fauzan sebagai bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai politik memiliki pandangan yang luas tentang politik. Dengan pandangan tersebut pesantren atau santri diharapkan mempunyai pengetahuan yang mumpuni tentang politik dalam arti yang sebenarnya, sehingga semua itu akan menjembatani terkontruksinya pemahaman yang benar tentang politik serta mempunyai kemampuan dalam menilai dinamika politik, memahami dan bahkan mengamalkan nilai-nilai tersebut baik dalam kehidupan lingkungannya (pesantren) maupun masyarakat, bahkan dalam Negara.

Apabila dilihat dari sudut pandang kepentingan, ilmu politik memang tidak akan sejalan dengan realitas dan politik, karena ilmu politik bekerja ideal, sedangkan realitas politik bekerja pragmatis dan cenderung mengikuti irama kepentingan yang ada dengan mereduksi makna dan hakikat politik yang sesungguhnya. Namun terlepas dari pandangan apapun, yang pasti pandangan politik disini haruslah sejalan dengan teori politik yang ada, karena pandangan politik itu adalah akumulasi penafsiran terhadap teori politik sebagai awal gagasan-gagasan politik. Pesantren Fauzan di samping sebagai bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai, juga bagian dari potensi negara kiranya mempunyai peran

yang tidak sedikit dalam memberikan pemahaman ataupun pandangan-pandangan terkait nilai-nilai politik baik kepada santri ataupun masyarakat.

Adapun yang melatarbelakangi pandangan pesantren mengenai pentingnya politik dalam kehidupan pada dasarnya pesantren mulai menyadari bahwa lembaga tersebut merupakan bagian dari Negara yang harus menghadapi tantangan besar dengan semakin menurunnya moral atau akhlak pada generasi muda sekarang akibat budaya luar yang berdampak negatif (westernisasi) dan faktor-faktor lainnya. Masuthu (2008:18) dalam hal ini menilai bahwa akibat pengaruh globalisasi, pesantren tidak bisa menutup diri dari perubahan sosial yang sangat cepat. Nilai-nilai modern sebagai *snow balling* efek modernisasi mulai mempengaruhi nilai-nilai budaya pesantren. Realitas ini memang terasa sebagai suatu dilema yang tidak mudah dipecahkan bagi pesantren .

Beberapa pandangan yang diterapkan di pesantren kepada para santri salah satunya yaitu bahwa kehidupan di dunia merupakan sebuah proses untuk memperoleh kebahagiaan yang tidak hanya di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Dalam hal ini, pesantren senantiasa berusaha mencetak santri yang memiliki pemahaman yang utuh dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai yang sosial termasuk nilai politik. Seperti yang diungkapkan AW mengenai keterlibatan pesantren dalam politik, hal ini menyangkut bahwa manusia merupakan bagian dari makhluk berpolitik atau *zoon politicon*. Lebih jauh Al-Qur'an pun mengisyaratkan pentingnya hidup berdampingan seirama dengan pemerintah. Oleh karena itu, pendidikan politik itu sangat bagus dan penting, karena kalau tidak punya bekal pendidikan termasuk pendidikan politik, maka pemahaman

masyarakat mengenai politik akan menyimpang. Sebagaimana apa yang diungkapkan Achmad Patoni (2007:164) yang pada intinya mengatakan bahwa didalam ajaran Islam, segenap aktivitas hidup yang tidak melanggar hukum Allah adalah ibadah. Demikian juga berpolitik adalah ibadah. Hal ini didasarkan atas doktrin Islam yang tidak memisahkan secara tegas antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrowi. Ajaran Islam itu *Syamilan wa kamilan* (meliputi segala aspek kehidupan). Oleh karena itu, berpolitik bagi seorang muslim harus sesuai dengan rujukan syariat. Sebab, berpolitik juga menjadi bagian yang erta dalam syari'at

Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa kedudukan manusia bagian dari insan politik yang dibekali cipta, rasa dan karsa yang harus dipertanggungjawabkannya. Konsekuensi logisnya yaitu sebagai insan politik manusia harus mempunyai kesadaran bahwa ia adalah bagian dari warga negara yang wajib memiliki kesadaran untuk mempunyai rasa tanggung jawab dalam memajukan, mengabdikan serta memberikan kontribusi kepada Negara. Hal tersebut seperti sabda Nabi Muhammad SAW: "*hubbul wathon minal iman*" yang artinya cinta negara merupakan bagian dari iman. Di samping itu, firman Allah dalam surat An-nisa: 59 yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul dan orang-orang yang memerintah (Ulil Amri) diantara kamu (kaum muslimin).*"

Kerangka dasar pemikiran politik dalam Islam memang banyak diintrodusir oleh nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadist terutama nash-nash yang berkaitan dengan konsep musyawarah (*syura*), keadilan (*a'dalah*),

perjuangan melawan agresi. Pada umumnya konsep-konsep ini jarang tersentuh pada pembahasan kitab fiqih karena aksetuansi kitab fiqih lebih banyak pada aspek ibadah, *mu'amalah* dan *jinayat*. Oleh karena itu, maka kajian pada wilayah politik ini membuka kita untuk melakukan *intellectual exercise (ijtihad)* yang didasarkan pada penalaran manusia dan menjadi wilayah *ijtihadiah*. Prinsip *syura* dalam Islam sesungguhnya mengidealkan suatu sistem sosial politik sebagai manifestasi dari egaliter dan penegakan nilai demokrasi

Dalam hal ini, muncul pertanyaan apakah Pesantren Fauzan berpolitik atau tidak, kemudian pendidikan politik dalam pengertian seperti apa yang diterapkan di Pesantren ini. Hampir semua responden mengatakan bahwa pesantren terlibat dalam politik. Namun pengertian politik yang dimaksud adalah berpolitik sesuai ajaran agama Islam dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ketika seseorang (santri) menjalani kehidupan politiknya, maka secara otomatis ia harus menjaga kesucian agamanya dan tidak sampai menduakan Tuhan nya (*syirik*). Suatu ilmu pengetahuan jika terus digali lebih dalam tentu tidak akan ada ujungnya dan ketika santri di bimbing untuk menggali ilmu pengetahuan setinggi-tingginya mereka harus ingat akan ketinggian ilmu yang hakiki yang akan mengarahkan mereka pada suatu pembelajaran dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka harus mengerti bahwa ilmu politik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang harus mereka ketahui, kaji, difahami, lalu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Saat santri menjalankan peranannya sebagai insan politik, maka berbagai siasat politik digunakan dalam rangka mencapai setiap tujuannya dengan catatan tentu saja harus sesuai dengan kaidah-kaidah agama.

Adapun keterlibatan Pesantren Fauzan dalam politik, tidak lantas membuat pesantren mengabaikan kewajibannya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, akan tetapi segalanya telah diatur dan dibagi-bagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa Pesantren Fauzan terdiri dari beberapa cabang yang semuanya merupakan satu kesatuan dan mempunyai tanggung jawab dan peran masing-masing. Termasuk ketika pesantren dihadapkan pada permasalahan ataupun hal-hal yang ada kaitannya dengan politik. Pesantren tidak serta merta memutuskan sepihak akan tetapi semuanya harus melalui musyawarah dengan keluarga besar.

Namun yang harus digaris bawahi disini adalah bahwa Pesantren Fauzan bukanlah partai politik yang notabene mempunyai fungsi yang jelas dalam proses sosialisasi politik, akan tetapi Pesantren Fauzan adalah bagian dari lembaga pendidikan yang mempunyai kesadaran pentingnya pendidikan politik bagi kehidupan santri dan masyarakat. Maka dari itu, sejauh langkah ataupun sikap pesantren dalam politik tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Syariat, maka pesantren Fauzan bukan hanya ikut andil dalam upaya memberikan kontribusi kepada Negara akan tetapi pesantren siap berada di garda depan. Dalam kaitannya dengan keterlibatan pesantren dalam berpolitik, Nanang Takik (2004:200) berpendapat bahwa pada dasarnya para ulama yang tidak terlibat dalam politik praktis pun tetap memiliki peran politis dalam bentuk pendidikan politik rakyat sebagai perwujudan dari peran pencerahan mereka terhadap umat. Peran ini sebenarnya telah dilakukan oleh para ulama, tetapi kurang optimal. Mereka juga bisa melakukan tindakan politik meski dengan jalan non-politik

(*political action in the non-political way*), yang dilakukan dalam kerangka melakukan *amr ma'ruf nahy munkar* (mendorong kebaikan dan mencegah kemunkaran). Dengan komitmen kepada penegakan etika moral, mereka bisa jadi pihak independen dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah serta proses dan aktivitas politik yang berlangsung.

Seperti halnya pernyataan Nanang Takik di atas, yang menegaskan bahwa peran pesantren dengan jalan non-politik pun melalui *amr ma'ruf nahy munkar*, maka hal tersebut sudah merupakan bagian dari keterlibatan pesantren dalam politik untuk mengontrol pemerintah serta proses dan aktivitas politik yang berlangsung. Begitupun Pesantren Fauzan. Sejauh ini Pesantren Fauzan senantiasa terlibat dalam hal politik baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam arti luas pesantren pernah menjadi contoh program KB, ketika sebagian ulama menentang program tersebut, sikap pesantren yang memang senantiasa legowo menjadi orang pertama di kalangan pesantren yang mencoba program tersebut hingga pada akhirnya orang-orang pun mengikuti. Kemudian dalam arti praktis pun pesantren turut serta memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat termasuk dalam hubungannya dengan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik kepada santri dan masyarakat.

Pengertian pendidikan politik yang diterapkan di Pesantren Fauzan adalah pemberian pemahaman kepada santri ataupun masyarakat melalui pengajian-pengajian yang setelah itu dilanjutkan dengan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan itu tidak hanya sebatas masalah politik saja, akan tetapi lebih luas musyawarah dilakukan untuk membahas persoalan-persoalan yang menyangkut

umat yang sedang berkembang. Adapun khusus yang menjadi dasar dalam berpolitik pesantren ini adalah bahwa bukan agama untuk politik tapi politik untuk agama. Dengan kata lain, apapun tujuan dan kegiatan yang dilakukan pesantren semuanya harus bersumber demi dan untuk agama. Berbicara masalah pendidikan politik (*political education*), terutama menyangkut wawasan dan nilai-nilai politik pesantren memang sangat penting. Hal demikian menunjukkan bahwa pesantren terkait dengan eksistensinya sebagai bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi dalam upaya kemelekan politik santri sehingga mereka dapat secara optimal mengkonsepsi nilai-nilai tersebut secara utuh serta mengaktualisasikan perilaku politiknya secara bertanggung jawab.

Urgensi melek politik dalam hubungannya dengan pendidikan politik yang senantiasa diupayakan Pesantren Fauzan, sebagaimana menurut Idrus Affandi (1996:27) bahwa seseorang dikatakan melek politik apabila sekurang-kurangnya menguasai informasi dasar tentang siapa pemegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja, kemudian mengetahui bagaimana melibatkan diri secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan, memiliki kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana memutuskan sebuah isu, memiliki kemampuan mengenali tujuan kebijakan secara baik yang dapat dicapai ketika isu (masalah) terpecahkan, dan yang terakhir memiliki kemampuan memahami pandangan orang lain dan membenaran mereka tindakannya dan membenaran tindakannya sendiri.

Suatu perilaku politik yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik yang sudah melekat politik, baik dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Semua itu dipengaruhi pula oleh interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut terdapat nilai-nilai tertentu yang secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu. Karena, pendidikan politik sesungguhnya telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, sebab di mana ada manusia maka terdapat pula masyarakat atau dengan kata lain manusia adalah *zoon politicon*. Sehingga ketika terdapat unsur politik dalam kehidupan manusia maka akan terjadi sosialisasi politik dalam arti diluar dari pendidikan politik, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat

Oleh karena itu, santri dan masyarakat sekitar pesantren perlu ditingkatkan pengetahuannya agar dapat menjadi insan-insan politik yang sadar akan peranannya dan mengetahui apa hak dan juga tanggung jawabnya. Santri harus dibina dan terbiasa untuk memilih hal yang baik atau konstruktif dan meninggalkan tiap hal yang buruk berdasarkan konsepsinya terhadap objek-objek politik yang diyakini kebenarannya atau atas dasar kekayaan rohani yang dimilikinya. Dengan demikian, pengertian pendidikan politik disini adalah sebuah upaya untuk menciptakan santri dan masyarakat sekitar pesantren yang benar-benar melekat politiknya. Selain itu, pendidikan politik sebagai usaha dalam menciptakan hak politik yang dimiliki setiap santri di Pesantren Fauzan dalam membangun dan menjalankan suatu sistem politik yang ada. Di samping itu, mereka pun diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam sistem politik yangb menuntut

kedewasaan berpolitik untuk menciptakan kedamaian bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Bentuk Sosialisasi Nilai-Nilai Politik di Pesantren Fauzan dalam Kaitannya dengan Pendidikan Politik

Sosialisasi merupakan sebuah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh nilai-nilai, sikap, dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung pada masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya dengan pendidikan Mas'ud *et.al* yang dikutip oleh Ibrohim (2007:116) mengatakan bahwa proses sosialisasi merupakan sebuah “proses penyegaran” nilai-nilai masyarakat dan kebudayaan politik kepada seluruh warga negara berlangsung seumur hidup, sehingga dapat dapat berpengaruh langsung kepada warga negara, dapat dilakukan melalui pendidikan, serta bersifat tidak langsung akibat latar belakang seseorang atau kelompok. Pengertian tersebut menegaskan adanya keterkaitan antara sosialisasi dengan pendidikan, dimana sosialisasi sebagai sebuah proses salah satunya dapat dilakukan melalui proses pendidikan, baik langsung ataupun tidak langsung.

Adapun bentuk sosialisasi yang diterapkan di pesantren Fauzan hampir sebagian besar responden menyatakan bahwa proses sosialisasi tersebut dilakukan

baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun apabila dilihat dari segi proses penyampaiannya, pesantren ini nampaknya cenderung melakukan sosialisasi yang sifatnya langsung. Adapun bentuknya yaitu berupa pemberian penyuluhan, penjelasan, ajakan, arahkan politik yang akan membangun Negara. Proses penerapan bentuk sosialisasi tersebut yaitu melalui pengajian yang diadakan pesantren seminggu sekali. Dalam pengajian tersebut dihadiri oleh masyarakat sekitar se-wilayah Kecamatan. Kemudian pengajian bulanan yang dihadiri oleh masyarakat dan para alumni yang datang dari berbagai daerah, pengajian 6 bulan sekali biasanya dalam bulan syawal dan bulan Maulid Nabi. Dan yang terakhir pertemuan dalam acara haolan yang merupakan acara terbesar pesantren dalam mengenang Almarhum *pangersa* yang telah begitu berjasa mengembangkan pesantren dan juga turut serta membangun stabilitas Bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, sosialisasi politik langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu melalui imitasi, sosialisasi antisipatori, pendidikan politik, dan pengalaman politik (Tn. 2008).

Imitasi merupakan proses menyerap atau mendapatkan orientasi politik dengan cara meniru orang lain. Yang ditiru bukan hanya pandangan politik, tetapi juga sikap-sikap politik, keyakinan politik, harapan mengenai politik, tingkah laku politik, serta keterampilan dalam berpolitik, sedangkan sosialisasi antisipatori yaitu sosialisasi politik dengan cara belajar bersikap dan berperilaku seperti tokoh politik yang diidealkan. Adapun pendidikan politik lebih kepada upaya sosialisasi politik melalui pendidikan politik adalah upaya yang secara sadar dan sengaja serta direncanakan untuk menyampaikan, menanamkan, dan memberikan

pelajaran kepada anak untuk memiliki orientasi politik tertentu. Pendidikan politik bisa dilakukan di sekolah, organisasi, partai politik, media massa, diskusi politik, serta forum-forum politik. dan yang terakhir yaitu pengalaman politik dengan belajar langsung dalam kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik. Terlibat langsung dalam kegiatan partai politik.

Proses sosialisasi secara yang dilakukan di Pesantren Fauzan termasuk ke dalam proses sosialisasi langsung melalui imitasi dengan tidak mengabaikan esensi pendidikan politik, artinya bahwa dalam proses sosialisasi santri dan masyarakat cenderung menyerap atau mendapatkan orientasi politik dengan cara meniru orang lain dalam hal ini pesantren (kiai) sebagai figur yang menjadi rujukan masyarakat dalam segala hal, termasuk dalam aspek politik. Namun proses sosialisasi tersebut tidak sepenuhnya melalui imitasi, karena dalam sosialisasi yang dilakukan Pesantren Fauzan secara langsung ini terjadi sebuah proses yang panjang dalam kaitannya memutuskan permasalahan yang berhubungan dengan masalah politik. Dalam prosesnya, para santri dan masyarakat disini terlebih dulu diberi arahan atau pandangan umum mengenai politik dan bagaimana pandangan islam dalam berpolitik. Jadi, sosialisasi secara langsung di sini adalah sosialisasi yang tidak menegasikan esensi dari pendidikan politik itu sendiri. Aspek yang ditiru dalam sosialisasi tersebut tidak sampai pada tingkat keterampilan dalam berpolitik seperti halnya imitasi pada umumnya, namun aspek yang ditiru itu mengenai pandangan politik, sikap-sikap politik, keyakinan politik, serta harapan mengenai politik.

Di samping itu, Rush dan Althoff Althoff (2008 :38) juga mengemukakan model sosialisasi yang terdiri dari imitasi (peniruan) intruksi, dan motivasi. Imitasi menurut Rush dan Althoff (2008 :38) ”merupakan peniruan (copy) terhadap tingkah laku individu-individu lain dan merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak, walaupun sebenarnya tidak dibatasi pada masa kanak-kanak saja”. Kemudian intruksi, masih menurut menurut Rush dan Althoff (2008 :38) yaitu ”lebih kurang merupakan peristiwa penjelasan diri, sungguh pun harus ditekankan bahwa hal itu tidak perlu hanya terbatas pada poses belajar formal saja. Gaya ini banyak berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando. Melalui instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk apa. Cara instruksi ini juga terjadi di sekolah-sekolah, dalam hal ini guru mengajarkan siswa tentang sistem politik dan budaya politik yang ada di negara tersebut, sedangkan motivasi menurut Le Vine yang dikutip Rush dan Althoff (2008:39) yaitu sebuah bentuk ”tingkah-laku yang tepat-cocok” yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (*trial dan error*) : individu yang bersangkutan secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan-tindakan sama-cocok dengan sikap-sikap dan pendapat-pendapat sendiri.

Apabila mengacu pada pendapat yang dikemukakan Rush dan Althoff di atas yang menyebutkan model sosialisasi yaitu imitasi (peniruan) intruksi, dan motivasi, maka sosialisasi yang dilakukan Pesantren Fauzan termasuk ke dalam sosialisasi yang berbentuk instruksi yang merupakan peristiwa penjelasan diri

yang tidak hanya terbatas pada poses belajar formal saja. Sungguh pun gaya ini cenderung berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando, Cara instruksi ini juga seperti telah dikemukakan sebelumnya terjadi juga di sekolah-sekolah termasuk Pesantren Fauzan yang sebagai bagian dari lembaga pendidikan nonformal. Proses sosialisasi yang dimaksud dalam hal ini Pesantren memberikan informasi mengenai pandangan politiknya secara umum, termasuk hal-hal yang mendasari pandangan tersebut, arahan mengenai apa yang harus para santri atau masyarakat lakukan, dan bagaimana seharusnya mereka menentukan sikap.

Selain sosialisasi secara langsung pesantren juga tidak melupakan pentingnya proses sosialisasi secara tidak langsung. Dalam cakupan yang lebih luas pesantren selalu berupaya menjalankan nilai-nilai politik dalam kehidupan sehari-hari dengan mendukung program-program pemerintah yang ada kaitannya dengan pesantren seperti menjaga sinergisitas dengan Kepala Desa, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan adanya bentuk diskusi dan musyawarah yang sudah menjadi budaya pesantren, dalam hal apapun menjadi pembelajaran bagi santri akan nilai-nilai demokrasi untuk menghargai setiap perbedaan. Dan yang terakhir keterlibatan para santri dalam organisasi OSIS sekolah menjadi ajang pembelajaran politik juga bagi mereka dalam berorganisasi.

Adapun sosialisasi politik secara tidak langsung dapat dilakukan melalui beberapa hal diantaranya yaitu: pertama, melalui pengalihan hubungan antar individu yang merupakan hubungan yang pada mulanya tidak berkaitan dengan

politik, namun nantinya akan terpengaruh ketika berhubungan atau berorientasi dengan kehidupan politik. Kedua, melalui magang yang merupakan bentuk aktivitas sebagai sarana belajar. Magang di tempat-tempat tertentu atau organisasi non-politik, nantinya akan mempengaruhi seseorang ketika berhubungan dengan politik. Contohnya, mahasiswa ikut organisasi kemahasiswaan, dalam organisasi tersebut mereka belajar mengenai rapat, melakukan voting, dan membuat keputusan. Kegiatan ini akan sangat membantu manakala mahasiswa nanti benar-benar terjun ke dalam dunia politik praktis. Ketiga, generalisasi yaitu kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini selama ini yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan politik dapat mempengaruhi seseorang untuk berorientasi pada objek politik tertentu (Tn. 2008: 45).

Sosialisasi tidak langsung yang dilakukan Pesantren Fauzan termasuk ke dalam sosialisasi dalam bentuk magang. Santri di Pesantren Fauzan memperoleh pembelajaran politik secara tidak langsung melalui pengalaman mereka baik ketika ada kerjasama dengan program pemerintah, ataupun melalui pengalamannya dalam berorganisasi di pesantren maupun di sekolah (OSIS) serta melalui diskusi dan musyawarah. Dalam artian, secara tidak langsung santri telah terlibat dalam berbagai kegiatan politik dimana secara informal mereka mengambil materi-materi atau pembelajaran dari keorganisasian. Perilaku politik tersebut dapat dijumpai mulai dari yang biasa sampai yang kompleks. Kegiatan politik tersebut sebagai stimulus terhadap pembentukan sikap dan perilaku politik mereka, misalnya ketika dalam mengkritisi kepemimpinan organisasi di dewan kesantrian ataupun OSIS.

Adapun pengalaman-pengalaman tersebut, baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung merupakan salah satu variabel kunci dari model, dalam mana tingkah laku politik seseorang untuk sebagian ditentukan oleh banyaknya pengalaman. Pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap seseorang jelas menunjang atau memberikan pengaruh terhadap pengalamannya. Dengan cara yang sama proses transmisi dari pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap melalui bermacam-macam agen sosialisasi semuanya merupakan bentuk pengalaman-pengalaman tersendiri, dan pada waktunya dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman lainnya. Dengan demikian, pengalaman individu yang relevan secara politis itu muncul dari sosialisasi politik dan jelas memberikan kontribusi pada proses sosialisasi politik.

Bentuk-bentuk sosialisasi nilai-nilai politik yang diterapkan pesantren tersebut seperti yang diungkapkan oleh semua responden sangat berkaitan erat dengan tujuan dari sosialisasi itu sendiri. Dalam hal ini pesantren berpandangan bahwa apapun disesuaikan dengan tujuan, namun berbicara masalah tujuan, tentunya ketika dikaitkan dengan sosialisasi baik kepada para santri maupun kepada masyarakat semua itu harus disesuaikan dengan budaya pesantren. Berkaitan dengan hal tersebut, sebetulnya pesantren mengutamakan memberikan khusus tentang pendidikan politik itu tidak. Namun orang pesantren ketika kainya ada langkah tertentu, hal tersebut sudah menandakan suatu petunjuk. Dengan kata lain, kultur pesantren ketika kainya sudah mengambil langkah sesuatu, maka otomatis hal itu sudah dianggap santri-santri ataupun masyarakat sebagai hal yang

harus diikuti dan ditaati, karena suatu petunjuk perilaku seseorang yang dianggap panutan itu akan lebih kuat perilakunya dari pada ucapannya.

Hal tersebut, menunjukan kiai khususnya yang memimpin pesantren mempunyai posisi yang lebih terhormat sebagai pemimpin dalam masyarakat yang kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada wilayah agama tetapi meluas pada wilayah politik. Keberhasilannya dalam peran-peran kepemimpinan ini menjadikannya semakin terlihat sebagai orang berpengaruh yang dengan mudah dapat menggerakkan aksi sosial. Oleh karena itu kiai telah lama menjadi elit yang sangat kuat. Dalam hukum agama Islam, memang tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan, tetapi juga hampir semua hubungan sosial dan personal sehingga dengan demikian memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada para kiai dalam masyarakat. Masyarakat mempercayakan kepada kiai bimbingan dan keputusan-keputusan tentang hak milik, perkawinan, warisan, termasuk masalah politik. Itulah sebabnya pengaruh mereka sangat kuat.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Pesantren Fauzan dari bentuk-bentuk sosialisasi nilai-nilai politik yang diterapkan pesantren dalam kaitannya dengan pendidikan politik meski dengan bahasa dan redaksi yang berbeda namun pada intinya tujuan yang ingin dicapai Pesantren Fauzan yaitu dalam rangka menyatukan dan mensejahterakan umat untuk bersama-sama menuju *Mardhotillah*. Kejelasan tujuan dalam berpolitik memang sangat urgen dimiliki setiap insan politik, bukan hanya sebagai kebutuhan akan ketepatan mencapai

target, akan tetapi juga dalam hal ini sebagai seni berpolitik (*art politica*) dalam menjalani dan mengimbangi proses serta dinamikanya.

Kejelasan arah dan tujuan politik itu harus dilakukan secara tepat dan tidak secara determinan (*free will*), karena itu argumentasi atas tujuan dan cita-cita tidak sekedar merupakan persaingan antara ide pemikiran, tetapi bertujuan membangun kebenaran-kebenaran rasional yang berakar dalam sifat dasar manusia. Dalam hal ini setiap tujuan harus dijabarkan secara rasional, karena rasionalitas argumen mengenai tujuan merupakan parameter untuk mengetahui kejelasan tujuan atau target dari pendidikan politik. Dengan demikian tujuan tersebut harus benar-benar menginternal, mengidiologis atau diyakini urgensinya oleh pelaku politik, sehingga mampu mengoptimalkan setiap tindakan-tindakan yang dilakukannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tujuan politik Pesantren Fauzan adalah sebagai berikut:

- 1) mencapai keridhoan Allah dengan cara mendidik santri agar mampu hidup mandiri dalam kehidupan masyarakat baik sebagai insan Tuhan, insan sosial termasuk keberadaannya sebagai insan politik;
- 2) memberikan satu pemahaman yang memiliki kekuatan utuh dan sempurna dalam rangka mencetak generasi bangsa yang mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga nanti akan menjadi santri yang tetap berguna, baik untuk agama, untuk bangsa dan cakupan yang lebih luasnya untuk Negara;

- 3) tercapainya kebersatuan umat dan mempersatukan apa yang menjadi dasar perpolitikan pesantren guna menyebarkan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat;
- 4) ingin mensejahterakan umat, mengabdikan kepada umat, baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun dalam bidang yang lainnya; dan
- 5) mendidik santri supaya sanggup memperjuangkan dan mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara dengan penuh tanggung jawab.

Dalam hal ini pesantren merasa merupakan bagian dari potensi bangsa yang mempunyai peran yang strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik kepada para santri. Hal tersebut kalau tidak melalui politik maka akan sulit untuk dicapai.

Dari berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan pesantren, tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangan dari bentuk sosialisasi nilai-nilai politik tersebut. Adapun kekurangannya terkait penyampaian sosialisasi kepada anak yaitu kurangnya media untuk bisa sampai kepada pemahaman yang utuh, kemudian faktor lingkungan dimana pendidikan masyarakat di lingkungan pesantren tergolong relatif rendah. Adapun Kelebihannya yaitu bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pesantren diimbangi dengan suatu kharismati dari sosok kiai itu sendiri sehingga masyarakat tidak begitu was-was karena mereka sudah percaya dengan keadaan kegiatan pesantren sehingga informasi yang disampaikan pun otomatis menyebar sampai ke pelosok meskipun tidak disampaikan langsung oleh pesantren. Dalam hal ini mereka sendiri yang datang ke pesantren untuk meminta arahan untuk disampaikan kepada yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan pendidikan politik, seperti diketahui terdapat ada dua macam bentuk kurikulum, yaitu *intended curriculum* dan *hidden curriculum*. Adapun kurikulum yang digunakan pesantren dalam memberikan bekal nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan adalah lebih kepada bentuk kurikulum yang sifatnya tersembunyi (*hidden curriculum*) walaupun secara tidak langsung yaitu *intended curriculum* pun tetap digunakan, tepatnya dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kegiatan Organisasi Intra Sekolah (OSIS), atau dalam bentuk ekstra kulikuler lainnya. Hal tersebut hampir dikatakan oleh semua responden. Berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang diungkapkan Abdurrahman Wahid (2008:110) yang mengatakan bahwa sistem pendidikan di pesantren tidak didasarkan pada kurikulum yang digunakan secara luas, tetapi diserahkan pada persesuaian yang elastis antara kehendak kiai dan santrinya secara individual. Dengan demikian, santri telah dilibatkan dalam penentuan kebijakan pemilihan materi pelajaran yang akan disampaikan kiai kepada santri. Sampai pada taraf ini dan dalam kasus ini telah timbul suasana dan interaksi belajar secara demokratis.

Pada kenyataannya, Mengubah, menambah atau mengurangi kurikulum memang bukanlah perkara mudah. Di sekolah formal, hal itu berkaitan dengan proses borokrasi yang berbelit. Sementara di pesantren, problemnya adalah untuk merubah konvensi, wasiat, tradisi yang sudah terlanjur disakralkan. Dibandingkan dengan sekolah formal, pesantren berpeluang yang lebih terbuka. Untuk memasukan pelajaran ilmu politik, pesantren hanya memerlukan izin *ajengan* atau dewan ustadz. Pilihan pada ilmu politik ini karena *real life* saat ini menuntut

kalangan pesantren untuk segera melek politik agar tidak selalu menjadi bulan-bulanan para politisi.

Pembahasan kurikulum pada dasarnya memang belum banyak dikenal pesantren. Bahkan di Indonesia tema kurikulum belum pernah populer pada saat proklamasi kemerdekaan, apalagi sebelumnya. Berbeda dengan kurikulum, istilah materi pelajaran justru mudah dikenal dan mudah dipahami di kalangan pesantren. Namun untuk pemaparan berbagai kegiatan baik yang berorientasi pada pengembangan intelektual, keterampilan, pengabdian maupun secara umum kepribadian menurut hemat peneliti, agaknya memang lebih tepat digunakan istilah kurikulum.

Pemaknaan dan pemahaman kurikulum dalam pandangan para ahli pendidikan telah mengalami pergeseran secara horizontal. Perluasan Formulasi definitif kurikulum tersebut diprakarsai oleh J.Galen Saylor dan William M. Alexander seperti dilansir Nasution merumuskan bahwa *“the curriculum is the sum total of school’s efforts to influence learning. Whether in the classroom, on the play ground, or out of school”*. Kurikulum yang dimaksudkan adalah segala sesuatu usaha yang ditempuh sekolah untuk mempengaruhi (merangsang) belajar, baik berlangsung dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah. Kurikulum pesantren dalam wacana selanjutnya senantiasa mengacu pada pengertian luas yang diungkapkan Saylor bersama Alexander tersebut, sehingga bisa meliputi kegiatan-kegiatan intra-kulikuler maupun ekstra kulikuler, dan bisa melibatkan disamping aktivitas yang diperankan santri juga diperankan kiai sebagai pimpinan pesantren.

3. Metode Sosialisasi Nilai-Nilai Politik yang Diterapkan oleh Pesantren Fauzan dalam upaya Pembekalan Pendidikan Politik Kepada Santri

Sebagai suatu proses yang dilakukan bertahap dari sejak kecil sampai individu-individu menginjak dewasa, sosialisai politik harus dilakukan sesuai dengan sasaran dari apa yang di akan disosialisasikan. Dengan kata lain, dalam proses sosialisasi hal yang tidak kalah penting adalah masalah metode atau model yang akan diterapkan. Dalam hal ini Ramlan Surbakti (2008:117) mengatakan bahwa dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat menegenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik. Sedangkan yang dimaksud dengan indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik

Berkaitan dengan metode penyampaian sosialisasi politik di atas, penerapan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik diterapkan di Pesantren Fauzan yaitu awalnya pesantren dalam hal ini keluarga besar pondok Pesantren Fauzan mengadakan musyawarah mengenai pilihan politiknya. Kemudian setelah dihasilkan suara suara bulat, maka hasil musyawarah tersebut disosialisasikan lewat pertemuan pengajian yang diadakan rutin pesantren, baik pengajian mingguan ataupun bulanan. Adapun

pelaksanaannya yaitu setelah selesai pengajian inilah diselipkan nilai-nilai sosialisasi baik menyangkut permasalahan apapun yang sedang terjadi, termasuk dalam kaitannya dengan politik dalam hal ini sosialisasi nilai-nilai politik yang ingin pesantren informasikan kepada santri, alumni, ataupun masyarakat. Dalam proses sosialisasi ini pesantren memberikan gambaran umum mengenai hal-hal yang mendasari bagaimana dan seperti apa itu politik, serta alasan atau pandangan pesantren mengenai permasalahan yang hendak pesantren sosialisasikan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan AU bahwa proses penerapan sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan penerapannya tiada lain lewat silaturahmi, seperti dikatakan sebelumnya bahwa hubungan ataupun komunikasi antara pesantren dan masyarakat senantiasa terjembatani dengan diadakannya pengajian baik mingguan ataupun bulanan. Hal ini turut menjadi ajang silaturahmi sekaligus menjadi media sosialisasi persantren baik kepada santri ataupun masyarakat.

Berkaitan dengan metode apa saja proses sosialisasi nilai-nilai politik yang dilakukan pesantren dalam hal ini berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama proses penelitian di Pesantren Fauzan ini pada dasarnya tanpa menggunakan metode pun mereka dalam hal ini para alumni ataupun masyarakat mencari tau sendiri informasi dalam kaitannya dengan masalah politik, seperti misalnya dalam menentukan preferensi pilihan politik mereka. Pada prosesnya mereka datang sendiri ke pesantren untuk meminta pandangan, informasi, ataupun arahan dari pesantren. Namun berdasarkan hasil penelitian yang peneliti tanyakan kepada

beberapa responden, mereka menyebutkan beberapa metode yang diterapkan di pesantren secara tidak langsung. Metode tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. akhlakul karimah (suritauladan),
- b. pendekatan personal,
- c. ceramah,dan
- d. dialog (musyawarah),

Sebenarnya dalam hal politik, pesantren memang tidak menghususkan penggunaan metode tertentu agar para santri ataupun masyarakat memahami nilai-nilai politik yang harus mereka fahami. Kalaupun ada metode yang pasti metodenya disesuaikan dengan budaya atau pesantrenan seperti yang telah disebutkan di atas. Mengenai budaya pesantren sebagaimana dikemukakan Abdurrahman Wahid yang dikutip Suisyanto (2004) yang mengatakan bahwa pondok pesantren adalah bagian dari subkultur, karena eksistensi pondok pesantren sebagai sebuah lembaga kehidupan yang menyimpang dari pola kehidupan umum di negeri ini, terdapatnya sejumlah penunjang yang menjadi tulang punggung kehidupan pesantren, berlangsungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri dalam pesantren, lengkap dengan simbol-simbolnya, adanya daya tarik keluar, sehingga memungkinkan masyarakat sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di masyarakat itu sendiri, dan berkembang suatu proses pengaruh mempengaruhi dengan masyarakat diluarnya, yang akan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai baru yang secara universal diterima kedua belah pihak.

Berpijak dari pendapat tersebut menurut hemat peneliti, apabila akan meninjau sosialisasi nilai-nilai politik di pesantren termasuk mengambil kesimpulan mengenai metode dari sosialisasi yang di terapkan di pesantren tersebut, maka harus dikaji pula latar belakang mengenai nilai historis pesantren itu didirikan serta menyangkut kedekatannya dengan nilai budaya yang melembaga pada masyarakat. Karena, kita baru akan mengetahui sejauh mana proses sosialisasi suatu lembaga tersebut apabila terlebih dahulu kita mengkaji sejauh mana budaya atau tradisi yang berlaku di lembaga pesantren itu. Pendapat lainnya tentang budaya pesantren, sebagaimana menurut Anwar (2003:3) bahwa secara kultural lembaga pondok pesantren, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan telah ikut serta membentuk dan memberikan corak serta nilai kehidupan kepada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Figur kiai, santri, dan perangkat fisiknya biasanya menunjukkan iklim yang senantiasa dikelilingi oleh kultur yang bersifat religius keislaman. Proses keterpaduan dalam pesantren antara belajar, beribadah, dan bekerja merupakan proses keterpaduan dalam melaksanakan hakikat hidup manusia yang sudah diamalkan oleh santri. Memang kultur pesantren merupakan bagian dari kultur yang hidup di masyarakat. Adanya karakter budaya pesantren yang ditandai penerjemahan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan di masyarakat malalui peran serta kiai dan para santri tentunya membawa dampak yang signifikan ke arah penciptaan masyarakat yang lebih harmonis. Suatu hal yang penting dalam hal ini tentunya harus ada keterpaduan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai lainnya, termasuk dalam hal ini nilai-nilai politik. Adanya keterpaduan dalam hal ini

berarti bahwa kehidupan yang diciptakan harus seimbang yaitu antara kepentingan ibadah secara vertikal dengan Sang Pencipta juga dengan kepentingan duniawi atau yang menyangkut hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian, pesantren dengan segala potensinya termasuk budayanya harus mampu mensinergikan nilai-nilai politik kepada para santri sehingga dapat menumbuhkan kesadaran politik guna terciptanya tata kehidupan yang lebih terarah, sinergis dan harmonis

Dari beberapa metode sosialisasi nilai-nilai politik yang secara tidak langsung diterapkan di pesantren sesuai dengan budaya yang ada, metode yang paling efektif memberikan pengaruh terhadap pemahaman pendidikan politik para santri dan masyarakat hampir sebagian besar responden mengatakan bahwa metode yang paling berpengaruh itu adalah ceramah dengan suritauladan. Dalam pengertian disini adalah bahwa dalam melakukan proses sosialisasi hal apapun kita tidak hanya bicara, akan tetapi serta merta memberi suri tauladan baik kepada santri ataupun kepada masyarakat, karena bagaimana santri dan masyarakat akan mau menuruti ataupun menerima apa yang akan pesantren informasikan kepada santri dan masyarakat kalau pesantren sendiri tidak bisa memberikan contoh akhlak yang baik. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan AW yang mengatakan bahwa ketika pesantren berbicara, maka hal tersebut jangan ada perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya, dan perilaku tersebut dalam hal apapun tidak boleh ada perilaku yang tidak bermuara karena ibadah. Dalam pengertian, jangan sampai karena kita sedang mengerjakan sesuatu hal

yang sifatnya horizontal maka lantas kita meninggalkan atau melupakan hubungan yang sifatnya vertikal.

Pernyataan AW di atas menegaskan bahwa kiai sebagai figur yang senantiasa segala tingkah lakunya menjadi panutan santri dan masyarakat sebelum menyampaikan suatu hal yang berkaitan dengan apapun, maka terlebih dahulu hal tersebut harus sudah diamalkannya. Jika dihubungkan dalam sistem pendidikan pesantren fungsi keteladanan menjadi sangat dominan. Apalagi ketika dikaitkan dengan doktrin agama. Nabi Muhammad menjadi teladan bagi umat manusia, sementara itu para kiai adalah pewaris para Nabi (*al-ulama warasat al-anbiya*), maka kronologinya adalah para kiai menjadi teladan bagi umat Islam, terlebih lagi di pesantren kiai menjadi teladan bagi santri-santrinya. Justru pada dataran keteladanan inilah yang paling berat diantara beban-beban lainnya yang menjadi beban kiai termasuk beban intelektual. Sebagai contoh ketika kiai menyampaikan dalam pengajian bahwa shalat itu harus dikerjakan pada awal waktunya, maka harus telah menjadi kebiasaan kiai sehari-hari belau shalat di awal waktu.

Perilaku kiai menurut K.H Ali Maksum yang ditulis Nahrawi (2008:100) merupakan teladan pengamalan kandungan isi-isi kitab yang dipelajarinya. Beberapa nilai-nilai aplikatif yang harus diterapkan oleh para ulama pesantren adalah yang pertama, keakraban sikap yang tidak membentuk sebuah dikotomis yang sulit ditembus santri, karenanya rumah kiai tidak pernah tutup dari kegiatan sekitar pesantren, dan atau keinginan santri untuk berkomunikasi dan bertanya; kedua, nilai-nilai kesederhanaan, baik dalam berpakaian maupun dalam pembicaraan; ketiga, semangat mandiri dan loyalitas pada ilmu; keempat,

semangat kedisiplinan terutama disiplin waktu; kelima, berani menderita untuk mencapai tujuan. Hal ini terlihat dengan kebiasaan terikat dari puasa sunnat hingga shalat tahajud dan I'tikaf di Masjid.

Keteladanan kiai dalam hubungannya dengan sistem pembelajaran pendidikan pesantren, metodenya yaitu dengan menggunakan pendekatan holistik. Para pengasuh pesantren memandang bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan kesatuan atau lebur dalam totalitas kegiatan sehari-hari. Akibatnya muncul sikap saling menjaga komitmen dan konsistensi terutama dari pihak pengasuh baik kiai maupun ustadz. Apa yang dianjurkan oleh kiai maupun ustadz harus terlebih dahulu terefleksi dalam kehidupan keseharian mereka. Santri dapat mengamati perilaku kiai dan ustadznya secara leluasa, seperti juga mereka secara leluasa memantau kegiatan para santri

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan proses sosialisasi nilai-nilai politik kepada para santri atau masyarakat, dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik kepada santri ataupun masyarakat menurut sebagian besar responden yaitu ketika perilaku-perilaku elit politik yang tidak mampu mengaplikasikan nilai-nilai politik sesuai dengan apa yang diharuskan, sehingga terkadang ketika pesantren memberikan arahan tertentu terkait nilai-nilai politik, pesantren sering dihadapkan pada kondisi masyarakat yang sebagian antipati atau bahkan tidak mau tau apapun mengenai permasalahan terkait politik. Kemudian di sisi lain sarana juga menjadi kendala, meski memang sejauh ini hal tersebut dikatakan tidak terlalu menghambat apapun mengenai apa yang ingin pesantren informasikan atau sosialisasikan kepada santri dan masyarakat. Kendala terakhir

yaitu latar belakang pendidikan masyarakat itu sendiri. Kendala ini memang menjadi tugas bersama dimana disini peran pemerintah dan juga pesantren sebagai elemen pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya membangun masyarakat yang cerdas dan berbudaya.

Indoktrinasi selalu identik dengan proses sosialisasi politik. Mengenai indoktrinasi yang mewarnai proses sosialisasi nilai-nilai politik di Pesantren Fauzan ini hampir sebagian besar responden mengatakan bahwa dalam prosesnya indoktrinasi memang ada dan diterapkan di pesantren ini. Namun indoktrinasi yang diterapkan tersebut bukan indoktrinasi yang dilandasi atas dasar kepentingan ataupun hal-hal yang sifatnya praktis dan pragmatis, akan tetapi indoktrinasi dalam pengertian disini adalah berkaitan dengan tujuan berpolitik dari pesantren itu sendiri, yaitu untuk mempersatukan umat dalam menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Namun hal yang harus digarisbawahi disini adalah bahwa meskipun pesantren tidak secara tegas memberikan doktrin secara langsung akan tetapi kultur yang melembaga ketika pesantren sudah mengambil langkah sesuatu, maka otomatis hal itu sudah serta merta dianggap santri-santri ataupun masyarakat sebagai hal yang harus diikuti, karena suatu petunjuk perilaku seseorang yang dianggap panutan itu memang akan lebih kuat dari pada ucapannya. Berkaitan dengan hal tersebut Cliffort Geertz dan Horikoshi menunjukkan bahwa aspek politik dari kepemimpinan kiai perlu untuk diperhatikan karena pola patronasenya yang kokoh. Patron dilihat sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual para pengikut kiai, yang pada gilirannya menuntut penghormatan terhadap kiai. Afiliasi politik patron

(kiai) biasanya akan diikuti oleh *client*-nya (ummat, pengikut). Selain itu, perubahan apapun dalam sikap politik yang dibuat oleh patron akan menyebabkan perubahan serupa dalam sikap politik para pengikutnya. Dalam relasi konvensional antara patron klien, terjadi perubahan secara otomatis atas pada ranah klien atas apapun yang dilakukan patron.

Dalam hubungannya dengan indoktrinasi yang mewarnai metode sosialisasi nilai-nilai politik yang diterapkan pesantren dalam hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari besarnya kharisma dan peran kiai pesantren dalam bidang politik. Kiai adalah figur yang cukup berpengaruh dan menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam masalah ritual-spiritual keagamaan saja, akan tetapi dalam persoalan apapun, termasuk persoalan politik juga masyarakat di daerah-daerah tertentu, termasuk wilayah Fauzan yang sangat luas, merumerujuk kepada kiai dalam menentukan preferensi pilihan politik mereka. Hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang dikatakan Idrus Affandi (1996:136) yang mengatakan bahwa pendidikan dengan indoktrinasi dipandang sudah kurang tepat, karena dalam banyak hal terbukti kurang tepat, karena dalam banyak hal terbukti kurang memberi hasil sebagaimana diinginkan. Sementara itu penyadaran politik lebih berorientasi pada tindakan-tindakan, yakni mempraktekan apa yang telah diketahui dan difahami masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan politik yang efektif tidak sekedar menambah pengetahuan, tetapi sampai pada tingkat pengambilan keputusan dan tindakan.

Kajian terhadap proses indoktrinasi dalam proses pendidikan memang masih menjadi perdebatan yang menimbulkan pro dan kontra, walaupun sesungguhnya dalam proses pendidikan selalu menggunakan indoktrinasi, karena pada dasarnya indoktrinasi merupakan langkah awal untuk menanamkan ideologi. Seharusnya pendidikan politik dalam lembaga formal harus menghilangkan kekhawatiran terhadap proses indoktrinasi sebagai hambatan dalam pengajaran politik. Hal ini didasarkan pada pendidikan politik merupakan salah satu pelajaran yang ditempatkan pada semua jenjang persekolahan. Alasan lainnya menurut Dunn (Brownhill, 1989:8) yakni “Pendidikan politik di sekolah-sekolah telah memiliki tempat yang sah dalam kurikulum persekolahan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan politik sebagai syarat mutlak menjadi warga negara yang lebih dewasa.

Sementara itu, mengenai metode pendidikan politik dalam mensosialisasikan nilai-nilai politik, masih menurut Idrus Affandi (2009: 23) menyebutkan empat bentuk metode yang bisa diterapkan, yaitu: metode edukasi, metode keteladanan, metode informasi dan komunikasi, dan metode pemasyarakatan atau sosialisasi. Adapun penggunaan metode pendidikan politik di pesantren haruslah disesuaikan dengan karakter dan budaya pesantren itu sendiri, karena masing-masing lembaga pesantren itu biasanya mempunyai tradisi dan budaya yang berbeda-beda, meskipun pada umumnya hampir sama. Berkaitan dengan metode yang disebutkan Idrus Affandi di atas setelah peneliti amati, karakteristik Pesantren Fauzan dalam penggunaan metodenya secara umum

cenderung menggunakan metode ceramah melalui metode komunikasi melalui mimbar-mimbar dan juga metode keteladanan.

4. Media yang Digunakan Pesantren Fauzan dalam Proses Sosialisasi Nilai-Nilai Politik Kepada Para Santri

Sosialisasi politik merupakan suatu cara dalam mengembangkan dan menginformasikan nilai-nilai politik. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan sarana-sarana pendukung sosialisasi. Sarana tersebut dikenal dengan nama agen. Agen inilah yang melakukan kegiatan memberi pengaruh kepada individu. Rush dan Althoff menggariskan terdapatnya 5 sarana atau agen sosialisasi politik yang pada umum diketahui, yaitu : keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, tempat kerja, dan media masa. Adapun pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan nonformal termasuk kedalam agen atau sarana sosialisasi melalui sekolah.

Dalam kaitannya dengan proses sosialisai nilai-nilai politik, mengenai apakah pesantren menggunakan sarana ataupun media dalam proses sosialisasi tersebut berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pesantren menggunakan media. Sekalipun penggunaan medianya terbatas pada fasilitas yang ada saja karena jika melihat bentuk sosialisasi yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya apabila dikaitkan budaya pesantren urgensi dari pada media memang tidak terlalu urgen. Adapun media atau sarana yang diperlukan pesantren yaitu berupa tempat dan hal-hal lainnya yang menunjang berlangsungnya ceramah sebagai bentuk daripada sosialisasi yang biasa dilakukan. Menurut Rusadi

Kantraprawira (1999:57) media atau sarana dapat diselenggarakan antara lain melalui: pertama, bahan-bahan yang dapat dibaca (*readable, legible*), seperti surat kabar, majalah dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan yang biasa membentuk pendapat umum. Kedua, siaran seperti radio yang dapat didengar (*audible*) dan televisi serta film yang dapat dilihat dan didengar (bersifat *audio-visual*); dan ketiga, lembaga-lembaga asosiasi dalam masyarakat, seperti Masjid dan Gereja yang menyampaikan khotbah, serta kemungkinan juga melalui lembaga formil atau informil.

Bentuk media yang paling efektif dan sesuai dengan budaya pesantren yang berkaitan dengan proses sosialisasi politik yaitu dengan khotbah atau ceramah yang dilakukan pesantren. Hasil wawancara dengan sebagian responden, dapat diketahui bahwa bentuk media yang paling efektif yaitu dengan menggunakan media pendekatan personal, di mana hubungan tersebut terjalin melalui pengajian yang diadakan pesantren, baik pengajian mingguan ataupun bulanan. Namun sebagian responden mengatakan bahwa dengan khotbah atau ceramah yang rutin diadakan pesantren merupakan metode yang cukup efektif. Hal tersebut karena menurut mereka dengan ceramah santri atau masyarakat lebih cepat memahami apa yang disosialisasikan. Meskipun terdapat perbedaan mengenai bentuk media yang paling efektif dalam proses sosialisasi yang dilakukan pesantren, akan tetapi intinya kalau merujuk pada pendapat yang dikatakan Rusadi Kantraprawira bahwa media yang efektif itu tidak lain adalah ceramah atau khotbah yang dilakukan pesantren di tempat yang biasa dilaksanakan yaitu *Aula* (sebuah tempat diadakannya pertemuan)

Berkaitan dengan alasan mengapa media dibutuhkan dalam proses sosialisasi nilai-nilai dalam kaitannya dengan pendidikan politik para santri, hampir semua responden mengatakan media atau sarana mutlak diperlukan, karena hal apapun kalau tidak ditunjang dengan media ataupun sarana, maka akan sangat sulit untuk tercapainya suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini media yang digunakan pun harus media yang baik dan representatif. Baik dan representatif di sini bukan dalam arti sifat media itu haruslah canggih, akan tetapi maksud representatif adalah sesuai dengan kebutuhan dan bentuk sosialisasi yang diterapkan. Kemudian yang harus diperhatikan dalam penggunaan media di pesantren adalah media yang sesuai dengan budaya pesantren itu sendiri.

Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa penyelenggaraan pendidikan politik dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah melalui bentuk-bentuk lembaga yang telah disebutkan. Namun, penyelenggaraan pendidikan politik yang terbagi kedalam tiga jalur tidak menghilangkan esensi dari tujuan pendidikan politik itu sendiri, yakni meningkatkan kemelekan politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik yang tinggi. Hal paling penting, sesungguhnya komponen pokok dari proses pendidikan politik bukan terletak pada bentuknya, akan tetapi yang lebih pokok adalah substansi dari proses pendidikan politik yang meliputi materi dari kurikulum pendidikan politik itu sendiri.

5. *Implementasi Sosialisasi Nilai-Nilai Politik yang Diperoleh Para Santri dalam Kaitannya dengan Pendidikan Politik*

Implementasi sosialisasi nilai-nilai politik merupakan manifestasi dari pengalaman dan pemahaman pendidikan politik. Karena urgensi dari pendidikan politik itu sendiri yaitu adanya implementasi yang dilakukan secara nyata dalam suatu kegiatan politik. Perilaku pendidikan politik itu harus mengandung nilai-nilai yang mengembangkan kehidupan demokratis. Pendidikan politik sebagai pendidikan demokrasi, berarti mengajarkan, menanamkan, dan mensosialisasikan bagaimana keharusan bersikap dan berperilaku secara demokratis. Menurut Zamroni (2006:489) bahwa pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan berperilaku demokratis. Berbicara masalah demokrasi dalam pandangan Jhon Dewey bukan sekedar menyangkut suatu pemerintahan, melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Zamroni (2006:499) bahwa kehidupan bersama yang berlandaskan demokrasi itu memerlukan suatu visi dan kode etik yang dijabarkan secara formal dalam hukum atau Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh warga, sistem hukum yang objektif dan mandiri, sistem pemerintahan yang didasarkan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian struktur sosial politik dan ekonomi yang menjauhi monopoli dan memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi dan kesempatan yang adil bagi semua warga, kebebasan berpendapat agar ide-ide warga masyarakat dapat diserap oleh pemerintah dan kebebasan menentukan pilihan pribadi

Berkaitan dengan hal tersebut, eksistensi para santri dalam kehidupan politik baik di lingkungan pesantren maupun diluar pesantren pada akhirnya semua santri di Pesantren Fauzan mereka Semua diorientasikan untuk memiliki rasa tanggung jawab, baik terhadap terhadap diri sendiri, keluarga, agama lebih luasnya lagi yaitu tanggung jawabnya terhadap bangsa dan Negara. Adapun yang diarahkan pesantren baik ketika santri hidup dalam lingkungan pesantren maupun eksistensinya dalam lingkungan masyarakat adalah bahwa mereka harus memiliki akhlak, karena akhlak merupakan hal yang sangat penting. Eksistensi santri dalam kehidupan politik di lingkungan pesantren, mereka turut mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dan di luar lingkungan pesantren eksistensi para santri cenderung masih kurang begitu menonjol.

Kecendrungan preferensi politik para santri ketika adanya Pemilu (baik Pemilu pada ataupun sejenisnya) hampir semua responden mengatakan bahwa kecenderungannya mereka senantiasa mengikuti apa yang diarahkan oleh pesantren, meskipun pesantren tidak mengarahkan ataupun mengajak secara langsung. Artinya ketika santri ataupun masyarakat mengetahui arah dan langkah pesantren, tidak diarahkan langsung oleh pesantren pun mereka mengikuti dengan sendirinya. Hasil penelitian Jackson dan Moeliono dalam penyelidikan mereka mengenai mekanisme pengaruh otoritas tradisional dalam situasi-situasi ketegangan politik di Jawa Barat, menunjukkan bahwa ikatan-ikatan moral dan pribadi antara pemimpin dan pengikut tradisional menentukan tingkat sosialisasi kemasyarakatan. Ikatan sosial dan pribadi ini mengandung kewajiban moral atau hutang budi seorang anak buah yang diwajibkan terhadap bapak. Sekali terbentuk

hubungan antar bapak dan anak buah mengandung arti emosional dan praktis bagi kedua belah pihak. Kewajiban moral yang diikuti oleh hutang budi dapat dimobilisasi untuk aksi politik dan malahan untuk tindak kekerasan politik walaupun hampir tanpa ada petunjuk terhadap isi ideologi dari pertentangan itu

Dalam kaitannya dengan keberadaan Pondok Pesantren yang seringkali di datangi oleh calon-calon pejabat yang ingin duduk di pemerintahan untuk meminta dukungan, tanggapan pesantren berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada intinya pesantren sudah biasa didatangi oleh orang-orang yang bermaksud meminta dukungan atau hanya sekedar minta di do'a. Sebagian besar responden mengatakan bahwa sikap pesantren yang pasti mendo'akan bagi siapapun yang datang selama tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan umat, agama dan Negara. Akan tetapi jika dengan jalan tersebut malah akan membawa *madharat*, untuk dirinya, agama, bangsa dan Negara, sikap pesantren tetap mendo'akan akan kemaslahatan jalan yang lebih baik untuk siapapun itu orang yang datang.

Implementasi dari sosialisasi nilai politik, para prosesnya memang seringkali diwarnai dengan adanya doktrin. Mengenai ada tidaknya doktrin atau pengaruh kiai dalam penentuan preferensi politik para santrinya sudah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa langkah kiai dalam hal ini pesantren dalam kaitannya dengan sosialisasi nilai-nilai politik, tidak langsung disosialisasikan, langkah kiai dengan otomatis diterjemahkan oleh santri dan masyarakat sebagai suatu perintah yang harus diikuti dan ditaati. Dan dari apa yang peneliti amati selama proses berlangsungnya penelitian, pengaruhnya tidak hanya ada akan

tetapi memang kepatuhan santri, alumni ataupun masyarakat memang sangat kuat.

D. Temuan-Temuan Penelitian

- Pesantren Fauzan yang berdiri sejak tahun 1870 merupakan pesantren yang dari awal berdirinya telah terlibat dalam suatu gerakan dalam upaya melawan penjajah dan melepaskan diri dari kebengisan penjajah. Organisasi gerakan tersebut bernama gerakan dafusial di mana pada awal berdirinya gerakan tersebut dihadapkan pada dua kekuatan yang sangat menonjol yaitu kekuatan DI/TII dan Belanda. Gerakan dafusial tersebut tujuannya yaitu untuk menghindari diri dari bahaya dan ancaman yang sering kali mengancam masyarakat, termasuk pesantren. Adapun Salah satu doktrin nya yaitu apabila dihadapkan dengan orang yang musuh, maka tidak boleh melakukan penyerangan lebih dahulu, akan tetapi yang harus dilakukan yaitu dengan menyelamatkan diri dari kejahatan, dan bahaya yang menyerang.
- Adapun pondok Pesantren Fauzan yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Garut diantaranya adalah pondok Pesantren wanita Babakan Fauzan Pondok Pesantren Safinatul Faizin (Fauzan II) Simpang-Cibalong-Garut, Pondok Pesantren Salaman (Fauzan III) Suka Mulya-Sukaresmi – Garut, Pondok Pesantren Al-Faizin (Fauzan IV) Sukaresi-Garut yang notabene menjadi objek penelitian dan merupakan pusat dari Pesantren Fauzan. Kemudian Pondok Pesantren Bidayatul Faizin (Fauzan V) Cipangramatan-Cikajang-Garut, Pondok Pesantren Mukhtarol Faizin (Fauzan

VI), Pondok Pesantren Majelis Ta'lim Mamba'ul Faizin (Fauzan VII) Tambakbaya-Cisurupan-Garut dan Pondok Pesantren Farohan (Fauzan VIII) yang berada di kampung Cintadamai Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut.

- Pesantren Fauzan yang merupakan bagian dari balai pendidikan nonformal dengan mempertahankan sistem ketradisionalannya merupakan pesantren yang senantiasa berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Hal tersebut bisa dilihat dengan didirikannya lembaga formal dari mulai Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Dalam kaitannya dengan politik, Pesantren Fauzan tidak lantas mengabaikan fungsi dan perannya dalam membina para santri. Karena keterlibatan pesantren dalam politik baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal tersebut dijalankan oleh orang yang pesantren tunjuk untuk mewakili dan menangani permasalahan ataupun persoalan yang ada kaitannya dengan politik sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Adapun urusan politik berpusat di Salaman (cabang Pesantren Fauzan) dan untuk persoalan mengenai pembinaan pendidikan termasuk ke NU-an tempatnya di Fauzan.
- Kekuatan Pesantren Fauzan dengan segala pengaruhnya yang begitu besar dalam bersyiar menuntun umat merupakan suatu bukti bahwa pesantren mampu menjalankan fungsinya sebagai fungsi religius (*diniyyah*), fungsi sosial (*ijtimaiyyah*), dan fungsi edukasi (*tarbiyyah*). Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pesantren dalam membina komunikasi dan hubungan dengan santri, alumni dan masyarakat melalui pengajian rutin yang diadakan

pesantren dalam tiap minggu dan bulan. Di samping itu, untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat dalam bersyiar pesantren juga mempunyai program pengajian rutin di mana pesantren mengunjungi daerah-daerah untuk mengisi pengajian-pengajian.

- Pesantren Fauzan dengan kultur budaya *ta'dzim* nya terhadap guru atau kiai memiliki ciri khas yang membedakan dengan pesantren lainnya. Adapun yang sangat menonjol dari pesantren ini adalah bahwa proses pembinaan nilai moral *adab-adaban* (akhlak), baik terhadap guru ataupun terhadap sesama lainnya sangat kental sekali, hal ini memang sudah ditanamkan dari awal didirikannya pesantren tepatnya pada tahun 1870. Selain itu bidang kajian yang menjadi ciri khas pondok pesantren ini yaitu di bidang fiqih, demikian kesan masyarakat lingkungan Fauzan dan sekitarnya.
- Dengan dilakukannya penelitian di pesantren ini memberikan kontribusi untuk semua pihak, khususnya untuk Pendidikan Kewarganegaraan mengenai gambaran sosialisasi nilai-nilai politik di pesantren yang sedikit berbeda dengan proses sosialisasi politik pada umumnya. Proses sosialisasi di pesantren tidak bisa lepas dari budaya pesantren itu sendiri dimana pesantren dengan segala karakteristiknya sangat kental dengan budaya *ta'dzim* kepada guru, sehingga proses sosialisasi pun menyesuaikan dengan lingkungan, serta kebiasaan dan juga kultur pesantren itu sendiri.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Sosialisasi Nilai-Nilai Politik dalam Kaitannya dengan Pendidikan Politik di Pesantren Fauzan” yang dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi serta mengacu pada referensi pendapat dari beberapa pakar atau ahli yang relevan, maka kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pesantren Fauzan yang merupakan bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai politik memandang bahwa politik itu sangat penting untuk dipelajari. Dalam hal ini pesantren mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist yang mengisyaratkan pentingnya hidup berdampingan mengikuti irama pemerintahan yang berjalan (*Ulil Amri*), karena bagaimana pun pesantren adalah bagian dari potensi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam upaya transformasi nilai kepada masyarakat. Namun nilai-nilai politik yang ditanamkan di Pesantren Fauzan dalam proses sosialisasi adalah nilai-nilai yang didasari dengan pembinaan moral dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam segala hal, baik dalam kapasitasnya sebagai insan Tuhan, insan sosial, dan dalam kapasitasnya sebagai insan politik.
2. Bentuk sosialisasi yang diterapkan di Pesantren Fauzan yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Dilihat dari segi proses penyampaiannya, Pesantren Fauzan lebih cenderung melakukan sosialisasi yang sifatnya

langsung berupa pemberian penyuluhan, penjelasan, ajakan, arahan politik yang akan membangun Negara. Adapun penerapannya yaitu melalui pengajian yang diadakan rutin oleh pesantren, baik melalui pengajian mingguan maupun bulanan. Tujuan yang ingin dicapai dari bentuk sosialisasi yang diterapkan tersebut yaitu dalam rangka mensejahterakan umat, mengabdikan kepada umat, baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik dan dalam bidang lainnya.

3. Metode yang diterapkan Pesantren Fauzan berkaitan dengan sosialisasi yang diterapkan yaitu dengan menggunakan metode akhlakul karimah (suritauladan), pendekatan personal, ceramah dan dialog (musyawarah). Namun pada dasarnya pesantren tidak mengkhususkan penggunaan metode tertentu dengan tujuan agar santri ataupun masyarakat memahami nilai-nilai politik. Meskipun begitu, beberapa metode tersebut disesuaikan dengan budaya kepesantrenan. Adapun metode sosialisasi yang paling efektif memberikan pengaruh terhadap pemahaman pendidikan politik para santri dan masyarakat yaitu metode ceramah dengan suritauladan.
4. Indoktrinasi yang seringkali mewarnai proses sosialisasi nilai-nilai politik khususnya di Pesantren Fauzan dalam prosesnya indoktrinasi tersebut memang ada. Namun indoktrinasi yang diterapkan bukan indoktrinasi yang dilandasi atas dasar kepentingan ataupun hal-hal yang sifatnya praktis dan pragmatis, tetapi indoktrinasi yang berkaitan dengan tujuan berpolitik dari pesantren itu sendiri, yaitu untuk mempersatukan umat dalam menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Dalam hal ini

pesantren tidak secara tegas memberikan doktrin secara langsung kepada para santri dan masyarakat, akan tetapi kultur yang melembaga ketika pesantren sudah mengambil langkah tertentu, maka otomatis hal itu sudah serta merta dianggap santri-santri ataupun masyarakat sebagai hal yang harus diikuti dan ditaati.

5. Penggunaan media dalam proses sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik Pesantren Fauzan hanya terbatas pada fasilitas yang ada saja, karena jika melihat bentuk sosialisasi yang sudah dijelaskan sebelumnya dan dikaitkan dengan budaya pesantren, urgensi dari media memang tidak terlalu penting. Adapun media atau sarana yang diperlukan pesantren dalam hal ini berupa tempat dan hal-hal lainnya yang menunjang berlangsungnya ceramah sebagai bentuk dari sosialisasi yang biasa dilakukan. Bentuk media yang paling efektif dalam kaitannya dengan proses sosialisasi politik kepada santri ataupun masyarakat yaitu melalui khotbah atau ceramah yang dilaksanakan di *Aula* sebagai sarana dari sosialisasi.
6. Implementasi dari sosialisasi nilai-nilai politik yang di peroleh para santri dalam kaitannya dengan pendidikan politik di Pesantren Fauzan dalam lingkungan pesantren para santri turut mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, musyawarah dan keorganisasian *rois/roisah* dalam kepemimpinan pesantren. Adapun diluar lingkungan pesantren eksistensi para santri cenderung masih kurang begitu menonjol.

7. Kecenderungan preferensi politik para santri ketika adanya Pemilu (baik Pemilu pada ataupun sejenisnya), hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan preferensi politiknya para santri dan masyarakat senantiasa mengikuti apa yang diarahkan oleh pesantren, sekalipun pesantren tidak mengarahkan ataupun mengajak secara langsung. Dalam hal ini kiai sebagai pimpinan pondok pesantren merupakan figur yang sangat berpengaruh dan berperan di masyarakat dengan segala atribut yang dimilikinya.

B. Rekomendasi

1. Konsistensi pesantren sebagai bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai politik harus selalu peka terhadap dinamika perkembangan yang terjadi dengan tetap tidak mengabaikan peran dan fungsi pesantren yang sesungguhnya, karena itu sosialisasi yang dilakukan harus mengupayakan pendidikan yang berorientasi pada kesadaran politik. Di samping itu, santri harus lebih difasilitasi, sehingga pesantren mampu mencerak santri yang lebih egalitarian, rasional, independen, kritis, inklusif, kredibel dan aktif di masyarakat agar transformasi nilai-nilai budaya pesantren sebagai *grand design culture* untuk mewarnai kehidupan politik masyarakat akan terrefleksi secara realistik (*waqi'iyah*) sesuai ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin*.
2. Sistem pendidikan pesantren harus selalu melakukan upaya rekonstruksi pemahaman terhadap ajaran-ajaran yang dilakukan agar tetap relevan dan

survive menghadapi perkembangan zaman. Bahkan, lebih lanjut pesantren harus mampu mewujudkan sistem pendidikan sinergik, yakni sistem yang memadukan akar tradisi dan modernitas. Jika strategi ini mampu dilaksanakan, hubungan pendidikan pesantren dengan dunia lain pun akan sinergis.

3. Kiai sebagai pusat kendali (*central figure*) pesantren, harus tetap menjadi benteng aktif yang membina, mendidik, mengayomi, dan mengawal umat dalam proses implementasi nilai-nilai politik yang memiliki entitas ajaran Islam dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam dinamika dan atmosfer politik.
4. Santri harus lebih termotivasi untuk belajar memupuk wawasan yang mendalam tentang politik, aktif berorganisasi agar ‘memangkas budaya minder’, sehingga memiliki orientasi yang lebih jelas dan dibuktikan dengan gerakan politik aktif ketika berkiprah dalam kepemimpinan akan mampu menciptakan kultur yang *the man on righ place*, baik kepemimpinan dalam masyarakat lokal maupun dalam skala yang lebih luas.
5. Pemerintah harus lebih proaktif dan serius dalam menjaga nilai-nilai kultur pesantren. Hal ini dianggap perlu karena pesantren memiliki kontribusi besar dalam peranan politik memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Adapun caranya dengan meningkatkan harmonisasi hubungan dengan ulama pesantren, serta membuat produk hukum yang spesifik tentang pola pendidikan berbasis kultur pesantren.

6. Partai politik, budayawan, pakar politik dan akademisi yang beragama Islam harus lebih banyak mengkaji kultur pesantren yang merupakan bagian dari agen sosialisasi nilai-nilai politik dalam kaitannya dengan pendidikan politik, sehingga hubungan pesantren dengan lembaga lainnya bisa saling memberi masukan dalam upaya membangun masyarakat sesuai dengan kultur ke Indonesia-an.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Affandi, Idrus. (2009). *Bedah Buku Political Education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart*. Bandung: Kencana Utama
- Alma, Buchori. (2006). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan dan Muhammad. (2001). *Demokratisasi dan Demiliterisasi (Wacana dan Pergulatan Pesantren)*. Jakarta: P3M
- Darmawan, Cecep. (2004). *Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Ilmu Politik*. Diklat Kuliah Ilmu Politik.
- Dhofier, Zamakhsari. (1982). *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai)*. Jakarta: LP3S
- Hajar, Ibnu. (2009). *Kiai di Tengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa*. Jogjakarta: IRCiSoD
- Horison, Lisa. (2007). *Metodologi penelitian Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ibrahim, Amin. (2009). *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Bandar Maju
- Jurdi, Fathurrohman. (2009). *Aib Politik Islam*. Yogyakarta : AntonyLib
- Kartini, Kartono. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Bandar Maju
- Madjid, Nurcholis. (2007). *Bilik-bilik Pesantren*. Jakarta: Dian Rakyat
- Margono. (2003). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: PT Rineka cipta
- Masyhuri dan Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : Refika Aditama

- Moeleong, Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moekry, Mukhotim. (2002). *Pesan-pesan Tercerahkan Untuk Para Ulama*. Jakarta Selatan: Wahyu Press.
- Nafi', Dian. *et al.* (2007). *Praktis Pembelajaran Pesantren*. Institute for Training and Development (ITD): Yogyakarta
- Nahrawi, Amiruddin. (2008). *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta : Gema Media
- Patoni, Achmad. (2007). *Peran Kiai Pesantren dalam Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Qomar, Mujamil. (2008). *Pesantren (dari transformasi metodologi menuju demokratisasi Institusi)*. Jakarta: Erlangga
- Riduwan. (2006). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta
- Rush dan Althoff. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Grafindo Persada
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Susimanto. (2004). *Menelusuri Jejak Pesantren*. Yogyakarta: Alief Press.
- Van Bruinessen, Martin. (1994). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan

2. Skripsi, Jurnal dan Dokumen lainnya

- Andriana, Devi. (2007). *Orientasi Perilaku Politik Santri dalam Budaya Pesantren*. Skripsi Sarjana UPI Bandung. Tidak diterbitkan.
- Hendarawan, Chandra. *et al.* (2006). Model Pendidikan Warga Negara Demokratis. "Peranan Pendidikan Politik dalam Membina Insan Akademis Berprilaku Demokratis". Jurusan PKn FPIPS.
- Mardiana, Rina. (2009). *Pendidikan Politik di Pesantren*. Skripsi Sarjana UPI Bandung. Tidak diterbitkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

